

**PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DENGAN
MODERASI BELANJA SOSIAL PADA 8 PROVINSI DI
INDONESIA**

*(The Effect of Zakat on Poverty with Social Spending as a
Moderating Variable in Eight Provinces in Indonesia)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



**MUHAMMAD HASAN AL BANNA
21423060**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi

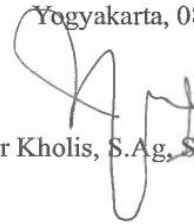
Nama : Muhammad Hasan al Banna

NIM : 21423060

Judul Skripsi : Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan dengan Moderasi
Belanja Sosial pada 8 Provinsi di Indonesia

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, disertai dengan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 April 2026



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Syawal 1447 H

Hal : SKRIPSI

9 April 2026 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 224/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/IV/2026 tanggal 9 April 2026 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hasan Al Banna

NIM : 21423060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

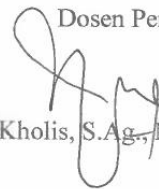
Judul Skripsi : Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan dengan Moderasi Belanja Sosial pada 8 Provinsi di Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasan al Banna

NIM : 21423060

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan dengan Moderasi Belanja Sosial pada 8 Provinsi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa pada hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 April 2026




Muhammad Hasan Al Banna



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan dengan Moderasi Belanja Sosial pada 8 Provinsi di Indonesia
Nama : MUHAMMAD HASAN AL-BANNA
Nomor Mahasiswa : 21423060

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji 1

Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

Penguji 2

Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.

(.....)

Yogyakarta, 04 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dekan.

Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'aalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kelimpahan kepada penulis dalam segi kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Tugas Akhir ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, serta selalu mendampingi proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Penulis sendiri yang telah berjuang dan pantang menyerah dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan berbagai tantangan dan hambatan selama proses penyusunan skripsi.

Keluarga yang juga memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang mampu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dosen pembimbing yang dengan baik dan sabar memberikan bimbingan serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi.

Teman-teman yang tidak penulis lupakan dalam menemani proses skripsi, baik dalam suka dan duka tetap memberikan dukungan serta doa.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi salah satu langkah bagi penulis untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik dimasa yang akan datang.

MOTTO

*“Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling terus-menerus walaupun sedikit.”
(HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.”
(HR. Muslim)*

Kebaikan untuk selalu memberikan manfaat kepada makhluk, senantiasa akan diberikan kemudahan dan keberkahan pula untuk diri kita sendiri.

ABSTRAK

PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DENGAN MODERASI BELANJA SOSIAL PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA

MUHAMMAD HASAN AL BANNA

21423060

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran zakat terhadap kemiskinan dengan mengintervensi rasio belanja sosial sebagai variabel moderasi serta menggunakan variabel kontrol Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia dalam pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti dengan instrumen keuangan sosial islam dan belanja sosial sebagai kebijakan fiskal pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis inferensial dengan regresi data panel mencakup *cross-section* dan *time series*. Model yang digunakan pada penelitian yaitu *fixed effect model* (FEM), disertai dengan uji asumsi klasik dan uji pemilihan model. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran zakat, belanja sosial, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan pada uji secara parsial, variabel zakat dan rasio belanja sosial menunjukkan arah hubungan negatif dan IPM menunjukkan arah positif. Namun variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pada variabel TPT menunjukkan arah positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan pada TPT . Namun, pada uji secara simultan rasio belanja sosial dapat memoderasi zakat terhadap kemiskinan dengan sangat signifikan dan terindikasi moderasi murni. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrumen komplementer terhadap kebijakan fiskal pemerintah yaitu belanja sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap penurunan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat, Rasio Belanja Sosial, Kemiskinan, Efek Moderasi, Regresi Data Panel

ABSTRACT

THE EFFECT OF ZAKAT ON POVERTY WITH SOCIAL EXPENDITURE AS A MODERATING VARIABLE IN EIGHT PROVINCES IN INDONESIA

MUHAMMAD HASAN AL BANNA

21423060

This study aims to examine the effect of zakat expenditure on poverty by incorporating the social expenditure ratio as a moderating variable, while using the Human Development Index (HDI), the Open Unemployment Rate (OUR), and Regional Fiscal Capacity (RFC) as control variables. Poverty remains one of the main challenges in Indonesia's economic development; therefore, efforts are needed to address this issue through instruments such as Islamic social finance and social expenditure as part of government fiscal policy. This study employs a quantitative approach using inferential analysis with panel data regression, covering both cross-sectional and time-series data. The model used in this research is the fixed effect model (FEM), accompanied by classical assumption tests and model selection tests. The variables used include zakat expenditure, social expenditure, poverty, human development index, open unemployment rate, and regional fiscal capacity. The results show that, partially, zakat and the social expenditure ratio exhibit a negative relationship, while HDI shows a positive relationship. However, these variables do not have a statistically significant effect on poverty. Meanwhile, the open unemployment rate shows a positive and significant effect on poverty. Furthermore, in the simultaneous test, the social expenditure ratio significantly moderates the effect of zakat on poverty and is identified as a pure moderator. This indicates that zakat, as a complementary instrument to government fiscal policy in the form of social expenditure, has a strong influence on poverty reduction.

Keywords: Zakat, Social Spending Ratio, Poverty, Moderating Effect, Panel Data Regression

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, dan hidayat - Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DENGAN MODERASI BELANJA SOSIAL PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA”. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dan membimbing umat manusia dari zaman yang gelap menuju jalan yang terang-benerang dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Islam. Dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi islam terkait peran zakat dan belanja sosial terhadap penurunan kemiskinan.

Dalam proses penyusunan skripsi, tentu penulis mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. Asmuni, M.A. yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama proses perkuliahan
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. yang telah memberikan pengarahan dalam proses akademik.

4. Ketua Program Studi, Anom Garbo, SEI., ME yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa studi.
5. Dosen Pembimbing, Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan arahan, kritik serta saran selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama masa studi.
7. Instansi terkait yang telah mempublikasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis secara terbuka menerima kritikan dan saran yang membangun dengan harapan dapat menyempurnakan skripsi ini dikemudian hari.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ى	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta Marbutah Hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'. c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
 - raudatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَة

- al-Madīnatul-Munawwarah
- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā	الْحَجُّ	-	al-hajj
نَزَّلَ	-	nazzala	نُعَمَّ	-	nu''ima
الْبِرُّ	-	al-birr			

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu	الْقَلَمُ	-	al-qalamu
السَّيِّدُ	-	as-sayyidu	الْبَدِيعُ	-	al-badī-u

الشمس - as-syamsu الجلال - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	khuzūna'ta	إِنَّ	-	inna
النَّوْءُ	-	an-nau'	أُمِرْتُ	-	umirtu
سَيِّئًا	-	syai'un	أَكَلَ	-	akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalī

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	baiti manistatā'a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-
baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a
linnāsi lallażī bibakkata
mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lażī
unzila fīh al Qur’ānu
Syahru Ramadān al-lażī
unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-
mubīn Wa laqad ra’āhu bil-
ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-
‘ālamīn

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PENGARUH ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DENGAN MODERASI BELANJA SOSIAL PADA 8 PROVINSI DI INDONESIA.....	i
REKOMENDASI PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka.....	9

B. Landasan Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Desain Penelitian	45
B. Waktu Penelitian	45
C. Objek Penelitian	46
D. Populasi dan Sampel	46
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	48
H. Instrumen Penelitian.....	50
I. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Subjek Penelitian	57
B. Hasil dan Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	88
RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	377
Tabel 4 1: Nilai Rata-Rata Variabel Berdasarkan Provinsi	588
Tabel 4 2: Nilai Rata-Rata Variabel Berdasarkan Tahun.....	59
Tabel 4 3: Nilai Statistik Deskriptif	62
Tabel 4 4: Nilai Variabel Independen Uji Multikolieritas	66
Tabel 4 5: Nilai Uji Normalitas.....	67
Tabel 4 6: Nilai Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4 7: Nilai Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4 8: Nilai Uji Robusnest.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Heatmap Hubungan Antara Variabel	51
Gambar 4.1 : <i>Scatter Plot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	69
Gambar 4.1 : <i>Scatter Plot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	69
Gambar 4.2 : <i>Scatter Plot</i> Uji Moderasi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia beragam, mulai dari keterbatasan akses, pekerjaan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, disparitas antar daerah, hingga rendahnya akses pendidikan dan kesehatan. Teori marjinal dari lewis menjelaskan kemiskinan merupakan masalah individu yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dan pilihan individu yang bersangkutan. selain itu budaya, karakter individu, apatis, kurangnya usaha, dan pengetahuan menjadi sebab lain dari kemiskinan (Rosana, 2019; Todaro, 2011; Susanto & Pangesti, 2020). Meskipun laporan Bank Dunia (2023) menunjukkan negara Indonesia hampir berhasil menghapus kemiskinan ekstrem (The World Bank, 2023), dan pada laporan BPS pada tahun 2024 Indonesia mengalami penurunan mencapai 0,33 persen dengan angka penduduk miskin 25,22 juta atau 9,03 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 25,90 juta penduduk atau 9,36 persen dari penduduk Indonesia sebanyak 27,9 (281,603,900 juta) juta penduduk. Meskipun demikian angka kemiskinan tersebut masih pada kesenjangan yang signifikan. Dalam perspektif multidimensi, kemiskinan tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut; pertama, kemiskinan multidimensi yaitu keberagaman kebutuhan manusia baik secara primer maupun sekunder. Pada aspek primer meliputi miskin aset, organisasi politik, pengetahuan serta keterampilan dan pada aspek sekunder yaitu miskin jejaring sosial, sumber keuangan, dan informasi. Kedua, kemiskinan itu saling berkaitan secara langsung atau tidak langsung. ketiga, kemiskinan yang berkaitan dengan desa atau lainnya, apakah kemiskinan dialami oleh penduduk atau manusianya (Wulandari, et al., 2022).

Pada konsep kemiskinan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. 1), ketidakmerataan distribusi pendapatan antar wilayah yang mengakibatkan ketimpangan sehingga dapat membatasi akses mereka yang di bawah terhadap peluang ekonomi. 2), Disparitas antar daerah, dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lebih memadai dibandingkan daerah kecil. 3) kurangnya akses pendidikan, pendidikan menjadi faktor dalam memberikan kesempatan bagi individu untuk keluar dari kemiskinan karena mendapatkan akses pada peningkatan keterampilan. 4), kurangnya akses kesehatan, dengan kurangnya akses kesehatan dapat membatasi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar seperti gizi yang baik dan sanitasi, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan rentan terhadap penyakit (Pratiwi et al., 2024).

Dari penyebab terjadinya kemiskinan di atas diperlukan kerangka strategi dasar dalam menekan angka kemiskinan. Terdapat setidaknya dua upaya yang perlu dilakukan untuk menangani kemiskinan yang meliputi kebutuhan dasar, dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka dari berbagai bidang kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin. Kemudian dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan dukungan kepada mereka agar dapat mencegah terjadinya kemiskinan baru melalui pelatihan keterampilan, sehingga cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Melalui peran aktif pemerintah dalam menyusun rancangan kebijakan strategis diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui kebijakan belanja sosial seperti memberikan dukungan kepada masyarakat tidak mampu berupa bantuan sosial sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Berdasarkan PPRI No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen sosial berupa bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial dengan bantuan

langsung tunai (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Kemudian PERMEN Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial, pada kementerian negara/lembaga pasal 3 tentang pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial, anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Jika dilihat berdasarkan laporan BPS pada tahun 2024 Indonesia mengalami penurunan mencapai 0,33 persen dengan angka penduduk miskin 25,22 atau 9,03 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 25,90 juta penduduk atau 9,03 persen dari penduduk Indonesia sebanyak 279 juta penduduk (BPS, 2025). Meskipun demikian, pada penerapannya, efektivitas pada belanja sosial seringkali terbatas oleh kemampuan fiskal daerah, disparitas antar wilayah, serta masalah ketepatan sasaran (Triyulianto, Nurvita, & Hidayaturahmi, 2024).

Dengan demikian angka kemiskinan tersebut masih dalam kesenjangan dan perlu adanya instrumen alternatif dalam mendukung pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dari pengeluaran belanja sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian ini belanja sosial diukur menggunakan rasio belanja sosial yang mencerminkan proporsi alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor sosial, sehingga lebih mampu menggambarkan prioritas kebijakan dibandingkan nilai nominal,

Isu yang terjadi terhadap kemiskinan di Indonesia juga dapat dianalisis melalui perspektif keuangan publik islam. Dalam konteks keuangan publik islam, zakat dapat menjadi instrumen alternatif yang melengkapi kebijakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Zakat memiliki legitimasi hukum yang sudah diatur melalui UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya sudah dilindungi oleh hukum yang dapat membantu proses pengelolaan zakat sesuai

dengan semestinya. Pada pasal 5 pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat ditingkat nasional. Kemudian pada pasal 17, LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki peran untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Pengumpulan zakat tersebut akan ditargetkan dalam mencapai keadilan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu pendistribusian ditargetkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan pada pendayagunaan akan digunakan pada program berkelanjutan yang memiliki efek jangka panjang (Pemerintah Republik Indonesia, 2001).

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar ke 2 di dunia, memiliki potensi zakat sebesar 327 triliun pada tahun 2024, namun pada realisasinya zakat yang terkumpul hanya sebesar 41 triliun pada tahun 2024 semester II . Namun jika dilihat berdasarkan data pengelolaan zakat pada laporan tahun 2024 pengumpulan ZIS nasional BAZNAS dan LAZ pada tahun 2022 dan 2023, dana ZIS terkumpul total mencapai 22,4 triliun pada tahun 2022 dan 33 triliun pada tahun 2023 semester I. Jika dilihat lebih jauh kebelakang dari tahun 2018 hingga 2023 semester I, pengumpulan zakat mengalami tren positif, yang berarti realisasi dalam pengumpulan ZIS mengalami peningkatan tiap tahunnya (BAZNAS, 2024).

Kemudian pada penyaluran zakat nasional pada tahun 2021 sebesar 21,7 triliun, pada tahun 2022 sebesar 21,6 triliun, dan pada tahun 2023 sebesar 31,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pada penyaluran zakat nasional menunjukkan peningkatan data dengan tren positif dari tahun 2021-2023. Sementara itu, pada tahun 2024 laporan yang diterbitkan PUSKAS BAZNAS, Zakat dan Pengentasan kemiskinan Nasional 2024, berhasil mengentaskan 1,350,227 jiwa termasuk diantaranya tergolong miskin ekstrem dengan jumlah 721,748 jiwa. Dari angka tersebut membuktikan bahwa zakat memberikan kontribusi positif sebesar 5,61 persen terhadap kemiskinan nasional. Ini menunjukkan bahwa peran zakat mendukung dalam program pengentasan kemiskinan (BAZNAS, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat tetap memberikan perkembangan positif yang dapat menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang cukup baik untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia meskipun belum mencapai target pengumpulan dari potensi yang sudah ditetapkan.

Namun demikian, pada hasil empiris terkait pengaruh zakat terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu pengaruh zakat belum mampu menjelaskan secara tunggal terhadap pengaruh kemiskinan, melainkan terdapat faktor-faktor lain untuk memahami hubungan tersebut secara komprehensif salah satunya adalah belanja sosial. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan indikator penghimpunan dan penyaluran zakat sebagai proksi pengelolaan zakat dengan temuan yang beragam. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan penyaluran zakat sebagai indikator yang lebih mencerminkan dana yang benar-benar diterima oleh masyarakat serta memasukan rasio belanja sosial sebagai variabel moderasi untuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengaruh kemiskinan (Nurlaela & Aswad, 2018; (Harahap & Nasution, 2024; Ridlo & Muthohar, 2020; World Bank, 2020).

Selain zakat dan belanja sosial, terdapat faktor lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat mempengaruhi dinamika kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada penelitian oleh (Kurniawan & Restianita, 2024). IPM yang tinggi cenderung dapat menurunkan angka kemiskinan, sedangkan TPT yang tinggi memiliki kecenderungan dalam meningkatkan resiko kemiskinan. Di sisi lain Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan belanja sosial. Daerah dengan KFD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang baik, sehingga dapat memberikan anggaran lebih terhadap menyediakan belanja sosial. Sedangkan daerah dengan KFD yang rendah berpotensi memanfaatkan zakat sebagai instrumen alternatif untuk menutupi keterbatasan fiskal. (Kusuma & Iskandar, 2022).

Oleh karena itu perlu pemahaman lebih lanjut mengenai moderasi IKF terhadap peran zakat terhadap kemiskinan, mengingat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa zakat memiliki pengaruh dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan moderasi belanja sosial, serta menguji peran IPM, TPT, dan KFD sebagai variabel kontrol terhadap dinamika kemiskinan. Namun penelitian dengan menguji pengaruh zakat menggunakan moderasi belanja sosial dan variabel kontrol IPM, TPT, dan KFD terhadap kemiskinan masih terbatas pada jumlah observasi penelitian yaitu hanya 40 sampel dengan 8 provinsi dengan rentang waktu 6 tahun (2019-2024). Kemudian pada variabel zakat menggunakan indikator pengeluaran zakat dan belanja sosial menggunakan rasio belanja sosial dengan proporsi total anggaran dan anggaran pada sektor sosial. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan BAZNAS dalam upaya merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya melalui sinergi antara zakat dan belanja sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mempengaruhi kemiskinan?
2. Sejauh mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam mempengaruhi kemiskinan?
3. Bagaimana peran Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap kemiskinan?
4. Apakah rasio belanja sosial dapat memoderasi hubungan antara pengeluaran zakat dan kemiskinan sehingga meningkatkan efektivitas pengeluaran zakat dalam pengentasan kemiskinan?
5. Apakah variabel interaksi antara pengeluaran zakat dan rasio belanja sosial berpengaruh terhadap kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibentuk maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan.
2. Mengetahui dampak Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan.
3. Mengetahui peran Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terhadap penurunan kemiskinan.
4. Menguji pengaruh moderasi rasio belanja sosial terhadap pengaruh zakat dan kemiskinan.
5. Mengidentifikasi pengaruh variabel interaksi antara pengeluaran zakat dan rasio belanja sosial terhadap kemiskinan.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur studi ilmu ekonomi islam khususnya pada keuangan publik islam zakat dengan analisis perbandingan belanja sosial dalam mengatasi kemiskinan.
 - b. Memperluas literatur belanja sosial sebagai variabel moderasi pengaruh zakat dan belanja sosial.
 - c. Menambah kajian empiris terkait IPM, TPT, KFD, dan kemiskinan dalam model pembangunan berdasarkan keuangan syariah dan kebijakan fiskal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan rujukan bagi BAZNAS sehingga dapat memberikan gambaran terkait pengaruh zakat dan perbandingan terhadap belanja sosial sehingga dapat menyusun strategi yang lebih optimal.
 - b. Informasi bagi pemerintah daerah dalam mendukung penuh program zakat dalam upaya menekan angka kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai tahapan-tahapan yang perlu dibahas dalam proposal skripsi. Terdapat tiga bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Sebelum masuk pada Bab I, terdapat bagian pertama yaitu Halaman judul, dan halaman daftar isi. Kemudian dilanjut pada Bab I yang membahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan penelitian ini disusun. Setelah itu dibentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari uraian latar belakang yang telah disusun.

Pada Bab II, terdapat tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada tinjauan pustaka peneliti menelaah hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan meliputi teori dan hasil analisis yang dapat memperkuat penelitian yang akan diteliti. Kemudian pada landasan teori menjelaskan mengenai topik penelitian berdasarkan teori yang relevan.

Selanjutnya Bab III metode penelitian, meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Kemudian pada bagian akhir pada proposal penelitian yaitu daftar pustaka. Berisi referensi yang menjadi sumber rujukan bagi peneliti dalam menyusun skripsi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menguraikan penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu kemudian digunakan sebagai indikator pembanding dan rujukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang akan digunakan. Peneliti melakukan penelusuran mengenai topik penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap penelitian ini dengan pembahasan mengenai konsep dan temuan baik dari zakat maupun kebijakan fiskal yaitu indeks kapasitas fiskal (IKF) terhadap kemiskinan. Adapun beberapa artikel jurnal yang akan dijadikan bahan rujukan sebagai berikut:

Penelitian Koni'ah dan Choiri (2025) dalam penelitian pengaruh zakat dan infak dalam pengentasan kemiskinan dengan tujuan mengetahui kontribusi zakat dan infak dalam mengentaskan kemiskinan periode 2015-2021 menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda. Penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan dari BAZNAS Indonesia dan tingkat kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan gini ratio BPS periode 2015-2021. Hasil dari penelitian tersebut yaitu zakat signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia sedangkan infak tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan (Koni'ah et., al, 2025).

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya namun sedikit berbeda pada variabel yang dibahas, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Pratama (2022) dalam penelitiannya yang membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah serta indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh ZIS, pertumbuhan ekonomi, harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010-2021. Menggunakan pendekatan kuantitatif berupa time-series dengan analisis data sekunder ZIS, pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per-kapita, dan taraf kemiskinan dari BPS dan

BAZNAS dengan total 72 unit observasi. Kesimpulan penelitian ZIS memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan, angka harapan hidup dan pengeluaran per-kapita memiliki pengaruh negatif signifikan, dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan serta semua variabel X secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Wulandari & Pratama, 2022).

Kemudian pada penelitian oleh Imsar, Sitompul, dan Nasution (2023) mengenai pengaruh zakat, pembiayaan syariah, anggaran, penerimaan, dan belanja negara terhadap kemiskinan dengan IPM sebagai variabel *intervening*. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak zakat, pendanaan syariah, dan APBN terhadap tingkat kemiskinan dengan mempertimbangan IPM. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi asosiatif pada data sekunder pada periode 2010-2021. Hasil menunjukkan zakat, keuangan syariah, APBN akan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di sebagian wilayah Indonesia, kemudian IPM mampu memediasi variabel x terhadap tingkat kemiskinan pada periode 2010-2021 (Imsar, Sitompul, & Nasution, 2023).

Penelitian oleh Ma'arif, Saleh, dan Saputri (2025) mengenai zakat, infak, sedekah dan kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh distribusi zakat, infak, dan sedekah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian menggunakan seluruh populasi yaitu dengan jumlah total 38 provinsi dengan rentang waktu 3 tahun dari 2022 – 2024 dan data yang diambil berasal dari BAZNAS Provinsi. Model yang digunakan dalam penelitian yaitu data panel dengan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan STATA17. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial zakat, infak, dan kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada analisis regresi kemiskinan di Indonesia jika tidak melibatkan variabel zakat, infak, dan sedekah maka tingkat kemiskinan sebesar 717.7183 jiwa. Kemudian pada analisis parsial zakat, infak, dan sedekah dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia. Jika dianalisis secara

simultan maka nilai menunjukan angka 0.0033 dimana angka tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat dijelaskan bahwa distribusi zakat, infak, dan sedekah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Ma'arif, Saleh, & Saputri, 2025).

Kemudian penelitian dengan hasil yang berbeda pada penyaluran zakat oleh Muna et al., (2025) tentang pengaruh penyaluran zakat, IPM, TPT, dan UMP terhadap kemiskinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dengan perioden 2018 – 2023. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat dan TPT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pada UMP dan IPM menunjukan hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan (Muna, Ali, & Indra, 2025).

Sementara itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Saerendra, Mukhsin, dan Najib (2025) Pengaruh Indeks Zakat Nasional, IPM, upah minimum, TPT, dan rasio gini, terhadap kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini terhadap kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada periode 2019-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kasual asosiatif dan dekriptif pada data sekunder dengan unit observasi 6 kabupaten dan kota provinsi Banten periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa indeks zakat nasional belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota Banten periode 2019-2024 karena pengumpulan dana yang belum optimal. Sedangkan IPM berpengaruh signifikan negatif, Upah minimum berpengaruh signifikan positif, pengangguran terbuka dan rasio gini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan variabel X simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Saerendra, Mukhsin, & Najib, 2025).

Sejalan dengan penelitian yang menunjukan zakat memiliki hasil yang tidak signifikan. Penelitian oleh Maghfirah (2021) tentang pengaruh

pengelolaan zakat terhadap kemiskinan di Indonesia dengan tujuan penelitian untuk mengukur efektivitas dalam pengelolaan zakat terhadap menekan angka kemiskinan. Artikel berupa kajian pustaka menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi pada tahun 2019. Pengelolaan zakat belum secara optimal dalam menekan angka kemiskinan yang disebabkan beberapa faktor, seperti pemberian dana zakat sementara, pengelolaan zakat yang belum terorganisir, jumlah distribusi yang terbatas, dan program zakat produktif yang belum komprehensif. Penelitian hanya terbatas pada pengelolaan zakat tanpa menambahkan variabel lain seperti IPM dan kebijakan fiskal sebagai pembanding (Maghfirah, 2021).

Kemudian penelitian oleh Mubarakah dan Pimada (2024) sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai temuan dari pengaruh zakat terhadap kemiskinan melalui kajian terhadap pengaruh penyaluran zakat PDRB dan pendidikan terhadap kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh distribusi zakat, GRDP, dan tingkat pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta pada periode 2016-2022. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisi regresi data panel pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Yogyakarta periode 2016-2022. Hasil menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan karena penyaluran zakat sebagian besar dalam bentuk dana konsumtif, GRDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Mubarakah & Pimada, 2024).

Selanjutnya pada penelitian yang lebih luas dengan variabel ZIS terhadap kemiskinan oleh Febrianto, Wati, dan Karimah (2025). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efek dari zakat, *Gross Domestic Product* (GDP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan rasio gini terhadap 34 provinsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiasi dengan model data panel regresi *fixed effect* dan jumlah observasi sebanyak 34

provinsi dengan rentang tahun 2019 – 2023. Hasil dalam penelitian menunjukkan pada zakat, infak, dan sedekah memiliki nilai 0.8910 yang kurang dari 0.05, dari nilai tersebut disimpulkan bahwa ZIS memiliki efek positif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tumpang tindihnya pendistribusian ZIS yang tidak efisien. Pada variabel lain GDP terhadap kemiskinan dapat memberikan pengaruh terhadap ZIS jika pendistribusiannya efisien. Hasil nilai GDP menunjukkan efek yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian pada variabel TPT dan rasio gini menunjukkan efek yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 34 provinsi. Masing-masing berdampak linear terhadap kemiskinan dikarenakan lapangan pekerjaan yang terbatas ditambah dengan sumber daya manusia yang tidak memadai. Selain itu pada rasio gini menunjukkan ketimpangan yang hampir sempurna yang disebabkan oleh kekayaan dan infrastruktur yang tidak merata (Febrianto, Wati, & Karimah, 2025).

Kemudian pembahasan lain mengenai kebijakan fiskal terhadap kemiskinan, penelitian oleh Lisna (2013) dalam mengkaji dampak kebijakan kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan bertujuan menguji fenomena *fly-paper effect* pada kebijakan fiskal penganggaran melalui belanja sosial di daerah yang tidak strategis dalam mengentaskan kemiskinan, menguji elastisitas kapasitas fiskal pada daerah strategis dalam mengentaskan kemiskinan, analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan dampak kapasitas fiskal dan transfer fiskal terhadap kemiskinan mayoritas penduduk miskin di Indonesia. dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika 2SLS prosedur SYSLIN. Data penelitian sekunder dari kementrian keuangan RI dan BPS berupa data panel 23 provinsi dan 391 kabupaten dan kota tahun 2005-2011 meliputi data realisasi fiskal, perekonomian, dan data kemiskinan. Hasil analisis penelitian yaitu kebijakan dalam peningkatan kapasitas fiskal melalui instrumen pajak daerah dan bagi

hasil pajak dapat berdampak mempercepat pengentasan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan yang diperoleh (Lisna, 2013).

Lebih lanjut penelitian oleh Salsabila, Muna, Pradana, dan Nurcahya (2024) mengenai bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan menggunakan metode kepustakaan dengan sumber data sekunder seperti literatur, laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil dari penelitian menunjukkan bantuan sosial dinilai kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun salah satu jenis bantuan sosial menunjukkan efektifitas dalam menyejahterakan kemiskinan yaitu pada Program Keluarga Harapan (PKH). Penyebab dari kurangnya efektivitas bantuan sosial disebabkan karena bantuan yang didistribusikan tidak tepat sasaran dan kebijakan politik yang kurang efisien dan efektif (Salsabila, Muna, Pradana, & Nurcahya, 2024).

Temuan serupa pada pengaruh belanja sosial terhadap kemiskinan oleh Triyulianto, Nurvita, dan Hidayaturahmi (2024). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Jenis pengambilan data yang diambil yaitu *purposive sample* dengan data sampel yang diperoleh sebanyak 55 sampel. Analisis menggunakan teknik regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DAU menunjukkan angka positif dengan nilai koefisien 0.01 artinya semakin tinggi nilai DAU semakin tinggi pula kemiskinan. Pada variabel DAK diperoleh nilai koefisien sebesar 0.004 atau negatif artinya semakin tinggi nilai DAK maka kemiskinan akan semakin rendah dan sebaliknya. Selanjutnya pada variabel belanja bantuan sosial dan belanja modal, masing-masing tidak berpengaruh pada kemiskinan. Pada bantuan sosial nilai koefisien sebesar -0.005 atau negatif hal ini disebabkan karena tidak tepat sasaran dalam menentukan penerima program sedangkan pada belanja modal 0.000. penyebabnya karena alokasi dana yang masih rendah dibandingkan belanja pegawai (Triyulianto, Nurvita, & Hidayaturahmi, 2024).

Temuan pada Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) oleh Pusparini dan Purbasari (2023) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh indeks kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan melalui belanja sosial sebagai variabel intervening. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif. Populasi unit observasi yaitu kabupaten dan kota Jawa dan Bali dengan periode 2018-2020 dengan 122 entitas, terdiri dari 93 kabupaten dan 29 kota kemudian sample purposive menjadi metode dalam mengambil unit observasi. Hasil dari penelitian yaitu indeks kapasitas fiskal berpengaruh terhadap belanja sosial dan tingkat kemiskinan dan belanja sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan serta tidak bisa memediasi indeks kapital fiskal terhadap tingkat kemiskinan. Keterbatasan penelitian yaitu hanya terbatas pada wilayah Bali dan Jawa dengan periode 3 tahun dan penelitian menggunakan belanja sosial sebagai variabel intervening yang belum memiliki banyak literatur (Pusparini & Purbasari, 2023)

Kemudian penemuan lainnya yang serupa tentang kebijakan fiskal oleh Rossa dan Ananda (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat terhadap kemiskinan dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan data panel kombinasi time series dan cross section. Penelitian meneliti data sekunder 15 kabupaten dan 7 kota di provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari BPS, DJPK, dan LHP LKPD dari BPK perwakilan Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan belanja sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan pada 15 kabupaten dan 7 kota di provinsi Jawa Barat. Kemudian hasil simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan kontribusi pengaruh sebesar 88,85% dengan sisanya dijelaskan oleh variabel lain (Rossa & Ananda, 2022).

Sementara itu berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, penemuan ini justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan hal tersebut dijelaskan pada penelitian yang

dilakukan oleh Putra dan Yuliarti (2025) tentang pengaruh kapasitas keuangan daerah terhadap kemiskinan di Sumatera Barat melalui belanja bantuan sosial. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengaruh belanja sosial terhadap kemiskinan. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif asosiatif dengan data panel memuat 19 kabupaten/kota dengan rentang waktu 2007-2023. Kesimpulan sekaligus temuan pada penelitian yaitu belanja sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra barat. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai *t-statistic* yang kurang dari 0.05, hal tersebut (Putra & Yuliarti, 2025).

Kemudian temuan serupa lainnya dalam penelitian oleh Kusuma dan Iskandar (2022) tentang PDRB, IPM, kapasitas fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia dengan tujuan untuk melihat pengaruh PDRB, IPM, kapasitas fiskal terhadap kemiskinan. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan model regresi data panel menggunakan random effect method (REM). Penelitian menggunakan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan sedangkan kapita fiskal dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Kusuma & Iskandar, 2022).

Kemudian lebih dijelaskan hubungan antara zakat dengan belanja sosial terdapat pada penelitian terdahulu oleh Susanti (2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai zakat dan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan *review* beberapa artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan zakat berfungsi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Kemudian kebijakan fiskal memiliki peran yang sejalan dengan prinsip Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu zakat dan kebijakan fiskal merupakan instrumen yang memiliki peran yang sama dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi (Susanti, 2024).

Selain itu, dalam menghubungkan antara variabel zakat dan belanja sosial melalui belanja negara terdapat pada penelitian oleh Pinasti dan Nastari (2025) menjelaskan pengaruh kemiskinan dengan variabel ZISWAF dan pengeluaran pemerintah. Penelitian menggunakan metode penelitian regresi data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan belanja negara pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial memiliki arah negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan apabila zakat dan belanja negara semakin tinggi maka dapat mengurangi kemiskinan pada provinsi di Indonesia. Sedangkan pada infak, sedekah, dan wakaf menunjukkan arah yang negatif namun tidak signifikan (Pinasti & Nastari, 2025).

Kemudian pada komposisi belanja sosial dijelaskan oleh Santos dan Simoes (2025). Penelitian menjelaskan komposisi belanja sosial, model kesejahteraan, dan standar hidup di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Komposisi diukur berdasarkan data belanja sosial secara total maupun berdasarkan pada sepuluh aspek intervensi, sedangkan standar hidup diukur menggunakan PDB riil per-kapita. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komposisi belanja sosial memiliki pengaruh terhadap peningkatan standar hidup antar negara dari waktu ke waktu. Secara komprehensif hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pasar tenaga kerja jenis belanja sosial memiliki pengaruh paling konsisten terhadap peningkatan standar hidup jangka menengah dan jangka panjang (Santos & Simoes, 2025).

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat memiliki makna diantaranya *an-naamu* (berkembang) dan *azzayadh* (bertambah). kemudian secara terminologi zakat memiliki makna yaitu kewajiban yang ditunaikan oleh pemilik harta untuk diberikan sebagian hartanya dengan persyaratan khusus kepada penerima yang berhak

menerimanya dengan persyaratan khusus (Hafidhuddin, 2002). Definisi yang serupa dari zakat dikemukakan oleh Abdul Mujiieb yaitu mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh syara. Kemudian oleh al-Syarbani sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu serta dengan syarat tertentu (Fitri, 2017).

Mahmud (1973) dalam Daud et al. (2011) menjelaskan kududukannya pada zakat sebagai rukun islam yang ketiga, zakat bermanfaat dalam menyucikan harta dan jiwa serta memberikan kebaikan yang melimpah bagi mereka yang telah mengeluarkan zakat karena imannya, sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 103. Makna menyucikan yaitu menjadikan kekayaan dan jiwa orang yang berzakat menjadi suci. Kemudian pada kata bertambah yaitu memberikan manfaat pada nilai (pendapatan) bagi mereka yang berzakat serta yang menerima (Mahmud, 1973, dalam Daud et al., 2011).

Chapra (2001) dalam Arafah (2021) berpendapat bahwa zakat tidak menjadikan kebijakan jaminan sosial modern dihilangkan melainkan sebagai pendukung bagi negara dalam menopang perekonomian. Selain itu zakat tidak menghapuskan kebijakan anggaran yang disubstitusikan kedalam bantuan bencana alam. Bahkan zakat tidak mengganti kebijakan negara dalam melakukan retribusi bahkan tidak mengganti redistribusi pendapatan, penciptaan lapangan, dan pemberdayaan ekonomi (Chapra, 2001, dalam Arafah, 2021).

Mekanisme penerapan zakat berperan pada individu manusia dalam menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, memberikan ketenangan jiwa dan sebagai pembersih harta. Selain itu manfaat dari zakat dapat berkontribusi pada keadilan ekonomi islam bagi umat muslim

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai dasar dalam mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak mendapatkannya dan menjadi instrumen keuangan yang dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi (Hafidhuddin, 2002). Al-Qardhawi, (2002) dalam Nafi (2021) menerangkan jika zakat memiliki tujuan dasar, yaitu menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Pada sistem pendistribusian zakat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang miskin (Al-Qardhawi, dalam Nafi, 2021). Kemudian A.M Al-Assal et al., (1999) dalam Daud et al. (2011) manfaat zakat bagi lain itu Hasbi (1991) berpendapat bahwa seseorang yang telah membayar zakat akan mendapatkan kebaikan dengan diberikan perlindungan dari kemiskinan dan fisik dan mental yang lemah (A.M Al-Assal et al., 1999, dalam Daud et al., 2011).

b. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai pendistribusian zakat yang memberikan manfaat bagi penerimanya secara berkelanjutan dengan cara menghasilkan sesuatu dari usaha produktif. Jika diuraikan dari kata zakat dan produktif dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki arti pemanfaatan secara terus menerus dari dana yang telah diberikan kepada mustahik kemudian dikembangkan melalui usaha dan memberikan dampak jangka panjang (Dimiyati, 2017). Yusuf (2007) menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif diberikan kepada mustahik dengan modal yang dipergunakan untuk menghasilkan manfaat dengan jangka panjang dan terbebas dari ketergantungan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat yaitu; 1) memiliki usaha yang layak. 2) sanggup untuk menerima bimbingan, dan 3)

melakukan laporan secara berkala setiap enam bulan (Anwar, 2018).

Dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa zakat dapat diberikan dalam bentuk modal usaha berupa alat pendukung atau perniagaan kepada fakir miskin dengan skill. Besaran zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan. Dan jenis bantuan yang dapat diberikan tergantung pada kebutuhan penerima manfaat pada usahanya.

c. Dasar Hukum

Dalam al-Qur'an telah ditetapkan kewajiban zakat bagi seorang muslim, hal tersebut tertera dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang artinya

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Kemudian zakat juga disebut pada surat at-Taubah ayat 103 yang artinya

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Kemudian pada hukum nasional, Indonesia telah menetapkan zakat dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan pelaksanaan dan pedoman yang telah diatur dalam keputusan Kementerian Agama No. 373 tahun 2003. Seiring berjalannya waktu aturan tersebut kemudian diatur sempurakan pada UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya peraturan tersebut maka penerapan zakat Indonesia memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan memiliki standar. Dukungan pemerintah tersebut diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat

agar bisa menyalurkan zakat kemudian memberikan kemudahan dan kepercayaan bagi masyarakat dalam berzakat (Iqbal, 2019).

a. Manajemen Zakat

Manajemen zakat mengacu pada pengelolaan zakat yang telah tertera pada UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ dengan menerima dan menyalurkan dana dari muzakki. Pada pengelolaan terdapat tujuan yang dicapai (Republik Indonesia , 2011) yaitu;

- 1) Memudahkan muzakki membayar zakat
- 2) Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mustahik
- 3) Pengelolaan zakat yang profesional
- 4) Kesejahteraan sosial

Pada sistem pengelolaan zakat terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu penerimaan dan pendistribusian, keduanya memiliki mekanismenya masing-masing. Pada penerimaan zakat, dilakukan oleh BAZ atau LAZ dengan cara menerima zakat dari muzakki. Dalam proses penerimaan tersebut amil menggunakan strategi untuk mengumpulkan dana ZIS seperti pembentukan unit dan membuka kounter penerimaan zakat, aspek penerimaan ini memiliki fungsi utama pada penyuluhan sebagai indikator keberhasilan (Muin, 2020).

Sedangkan pada pengelolaan zakat, memiliki dua kategori dalam pemberian dan pendayagunaan zakat, yaitu konsumtif dan produktif, dan masing-masing dari kategori tersebut dibagi menjadi empat (Muin, 2020). Penjelasan dari kategori tersebut lebih detail sebagai berikut;

- 1) Konsumtif Tradisional

Pada kategori ini zakat diberikan kepada mustahik secara langsung yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari melalui zakat fitrah berupa beras atau uang dengan pola jangka pendek.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat ini diperuntukan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang konsumtif seperti bantuan peralatan sekolah, bantuan beasiswa bagi pelajar, bantuan sarana ibadah, dan lain sebagainya.

3) Produktif Konvensional

Pendayagunaan pada zakat produktif konvensional diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat memberikan nilai manfaat berkelanjutan dalam mengelola usaha seperti mesin jahit, gerobak, dan lain sebagainya.

4) Produktif Kreatif

Produktif kreatif digunakan dalam bentuk modal bergulir yang manfaatnya dapat berupa pembangunan sekolah, sarana kesehatan, modal usaha, dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, zakat diberikan pada 8 golongan asnaf. Dengan tujuan untuk memberdayakan anggota masyarakat yang lemah secara ekonomi sebagai modal yang sifatnya bergulir. Sesuai dengan pasal 25 UU no.23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat didistribusikan dengan ketentuan syariat dan pasal 26 dilanjutkan dengan penjelasan mengenai skala prioritas pada pendistribusian zakat dengan acuan keadilan, pemerataan, dan kewilayahan (Muin, 2020).

Pendistribusian zakat produktif telah dirumuskan. Ulama kontemporer melalui ijtihad para fuqaha seperti yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan konferensi zakat DKI Jakarta yang

berfokus pada "pemberian modal" pada aktivitas ekonomi (Musa, 2020) poin tersebut sebagai berikut,

- 1) Zakat harus memiliki sifat ekonomis, edukatif, dan produktif sehingga mustahik menjadi mandiri bahkan menjadi muzakki.
- 2) Pengumpulan zakat apabila belum disalurkan kepada mustahik dapat digunakan baik dalam pembangunan maupun tabungan bank pemerintah.

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti kekurangan atau tidak memiliki harta. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat hidup layak, kemudian kemiskinan berarti kondisi seseorang yang berada pada standar garis kebutuhan minimum sandang dan pangan (Ferezagia, 2018). Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi hak-haknya dan kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang sejahtera.

Kemiskinan dapat didefinisikan kemiskinan memiliki dapat dijelaskan berdasarkan pada aspek spasial. Penduduk miskin dijelaskan secara sederhana adalah mereka yang biasanya tinggal pada daerah pedesaan dan berkerja sebagai petani atau peternak atau kegiatan lainnya yang berhubungan erat dalam dengan sektor ekonomi tradisional. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi finansial yang kurang atau tingkat pendapatan yang rendah, namun banyak aspek lain yang dapat menjadikan individu atau kelompok tergolong pada kategori miskin seperti tingkat pendidikan, kesehatan, perlakuan hukum yang tidak adil,

kerentanan terhadap tindakan kriminal, dan tingkat keberdayaan dalam mengambil keputusan (Todaro & Smith, 2006). Kemudian kemiskinan termasuk dalam masalah multidimensional yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, psikologi, teknologi, dan lainnya yang berkaitan erat satu sama lain (Wulandari et al, 2022). Lebih lanjut dijelaskan oleh Munkner (2001) tentang kemiskinan yang merupakan klaster yang kurang menguntungkan dari suatu individu dan saling berkaitan dengan individu lain sehingga mereka sulit untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan (Pratiwi et al., 2024). Kemudian diungkapkan oleh Amartya Sen mengenai ukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, melainkan hilangnya kapabilitas. Perlu dilihat juga, definisi dari kapabilitas yaitu individu dalam memiliki kebebasannya untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Dari fungsi tersebut maka manusia dapat menentukan arah tujuannya dalam mengelola sumber dayanya (Todaro & Smith, 2006).

Konsep kemiskinan jika dilihat dari segi pendapatan, merupakan konsep yang paling sering digunakan dalam sudut pandang ekonomi karena lebih terukur dan memiliki hubungan erat dengan indikator ekonomi lainnya. Konsep ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang dilihat dari pendapatan, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan dan non-makanan dengan batasan garis kemiskinan (*poverty line*) (Lisna et al., 2013).

Dalam perspektif islam kemiskinan dalam kamus Qamus al-Muht memiliki arti seseorang yang tidak memiliki sesuatu atau seseorang yang tidak dapat mencukupi kehidupannya atas apa yang ia miliki sehingga ia diam oleh kefaqiran. Makna lain dari miskin yaitu lemah. Kemudian jika diartikan dalam lisan

bahasa arab maka dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hal kapabilitas tersebut, maka seseorang dapat dikategorikan apakah tergolong miskin atau tidak dari seseorang. Kemiskinan kemudian dapat dibagi menjadi empat (Suryawati, 2005) yaitu;

1) Kemiskinan absolut

Apabila individu atau kelompok memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga mereka yang belum mendapatkan manfaat bantuan dari pemerintah memiliki perbedaan pendapatan dan terjadi ketimpangan.

3) Kemiskinan Kultural

Faktor budaya yang menjadi penyebab seseorang menjadi miskin seperti malas, pemborosan, tidak kreatif, dan tidak adanya usaha untuk memperbaiki kualitas hidup meskipun mendapatkan bantuan dari pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya pada sistem sosial politik dan budaya sehingga tidak dapat mendukung dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu, terdapat dua jenis kemiskinan yang dapat dibedakan yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (Suryawati, 2005) yaitu:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah disebabkan karena kelangkaan yang sumber daya alam dan prasarana yang terbatas.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan disebabkan karena sistem pembangunan modernisasi sehingga masyarakat memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi yang diberikan tidak merata.

Kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit untuk dihentikan. Hal ini dijelaskan oleh Nuscheler dalam Munker (2001), kemiskinan dapat menjadi lingkaran karena rendahnya sumber daya, tidak menguntungkannya persyaratan perdagangan, kondisi lingkungan yang buruk, tingkat pengetahuan yang rendah, keterbatasan akses informasi, pendidikan, serta pelatihan. Dari lingkaran tersebut berdampak pada kesulitan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena dari faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain (Pratiwi et al., 2024).

b. Indikator Kemiskinan

Mengukur kemiskinan dilihat dari kondisi suatu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu kemiskinan tidak hanya dapat diukur melalui rendahnya pendapatan saja, melainkan mencakup pada aspek sosial dan politik. Negara memiliki tujuan yang lebih beragam dan kompleks dalam mengatasi kemiskinan yang pada awalnya pembangunan suatu negara berfokus pada peningkatan pendapatan rata-rata. Konsep yang dijelaskan oleh World Bank dalam mengukur kemiskinan dilihat dari daya beli masyarakat sedangkan BPS mengukur pada garis kemiskinan dengan melihat kebutuhan minimum masyarakat baik makanan maupun

non-makanan. Jika seseorang memiliki pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan maka dapat dikatakan orang tersebut termasuk pada kategori miskin. Adisasmita (2005) menjelaskan pada umumnya kemiskinan memiliki indikator seperti upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih, perkembangan penduduk, urbanisasi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan (Ferezagia, 2018).

Indeks yang diperkenalkan World Bank dalam mengukur kemiskinan yaitu, indeks kemiskinan manusia yang didefinisikan sebagai keterbatasan individu dalam mengambil pilihan dalam hidup. HPI mengukur secara agregat suatu negara dari tiga dimensi, namun indeks tersebut tidak dapat mengukur individu atau kelompok rumah tangga miskin. Sedangkan pada level individu dan rumah tangga dikembangkan indeks sendiri yaitu kemiskinan multidimensi melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

c. Penyebab Kemiskinan

Terdapat berbagai penyebab kemiskinan yang terjadi, salah satunya disebutkan oleh Michael Lipton yaitu pada kebijakan urban bias yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah pedesaan. Jika ditinjau lebih jauh, penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor yaitu;

1) Faktor kondisi alam

Kerusakan lingkungan yang terjadi mengakibatkan distribusi sumberdaya menjadi tidak merata dan kemungkinan bencana alam menjadi lebih tinggi.

2) Faktor penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan sumberdaya menjadi semakin terbatas serta kebijakan migrasi dari pedesaan ke perkotaan yang berpengaruh pada kepadatan penduduk pada satu wilayah.

3) Faktor eksploitasi

Baik antarkelas, kelompok, wilayah, bahkan negara yang dapat mengganggu hubungan menjadi tidak seimbang.

Selain itu ada beberapa penyebab lain dari terjadinya kemiskinan hal tersebut dijelaskan oleh Nasikun (Suryawati, 2005) diantaranya;

1) *Policy induces process*

Kemiskinan dilestarikan melalui kebijakan salah satunya kebijakan antikemiskinan yang pada realitanya berbanding terbalik.

2) *Socio-economic dualism*

Kemiskinan yang terjadi pada negara eskoloni karena adaptasi dari pola produksi kolonial, yaitu petani besar menguasai tanah paling subur dan melakukan ekspor.

3) *Population growth:*

Pandangan terhadap pertumbuhan penduduk pada teori Malthus seperti deret ukur dan penambahan pangan seperti deret hitung.

4) *Resource management and the environment*

Adanya unsur kesalahan manajemen pada sumberdaya seperti penebangan liar sehingga berpengaruh negatif pada produktifitas.

5) *Natural cycles and process*

Proses natural terjadi karena siklus alam, sebagai contoh pada lahan kritis, dimana produktivitas

bergantung pada iklim yang mendukung produktivitas lahan.

6) *The marginalization of women*

Diskriminasi terhadap wanita dalam dunia kerja sehingga akses terhadap penghargaan dan pekerjaan terbatas.

7) *Cultural and ethnic factors*

Kebiasaan yang terjadi pada lingkungan etnik dan budaya dalam memelihara kemiskinan, seperti petani dan nelayan pada saat panen raya yang berperilaku konsumtif.

8) *Exploitative Intermediation*

Keberadaan rentenir yang memberikan kesengsaraan pada masyarakat.

9) *Internal political fragmentation and civil strife*

Penerapan kebijakan pada wilayah dengan fragmentasi kuat menjadi penyebab kemiskinan

10) *International Process*

Sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme menjadi faktor dalam penyebab kemiskinan banyak negara.

Sementara itu untuk penyebab dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor (Pratiwi et al., 2024) diantaranya:

1) Distribusi yang tidak merata

Pada pendapatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, lalu pada antar golongan masyarakat yang kaya dan miskin menjadi salah satu penyebab utama mengapa di Indonesia kemiskinan masih tinggi. Dari ketimpangan tersebut maka terjadi ketimpangan yang

berdampak pada keterbatasan akses dan peluang terhadap sumber daya pada golongan yang rendah.

2) Disparitas antar daerah di Indonesia

Dengan adanya disparitas maka terjadi perbedaan pada manfaat pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik sehingga memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.

3) Keterbatasan Akses Pendidikan

Pada Daerah terpencil akses pendidikan sangat sulit untuk dijangkau sehingga mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup.

4) Keterbatasan Akses Kesehatan

Kesehatan menjadi hal krusial karena berhubungan dengan kemiskinan. Mereka yang tidak dapat dengan mudah mengakses kesehatan, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pada kesehatan termasuk pemenuhan gizi dan sanitasi yang memadai sehingga rentan terhadap penyakit dan berdampak pada kualitas kerja seseorang dalam kegiatan produktif.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lambat berpengaruh pada sektor ekonomi informal dengan penyerapan tenaga kerja yang mendominasi seringkali pendapatan mereka tidak stabil, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

6) Sosial Budaya

Sosial dan budaya menjadi faktor dalam mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, sebagai contoh

menikah muda dan memiliki banyak anak yang dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan keluarga.

d. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan dapat memberikan dampak (Wulandari et al., 2022), diantaranya yaitu:

1) Peningkatan kriminalitas

Kondisi yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat miskin menjadi cenderung untuk melakukan tindakan kejahatan.

2) Kematian meningkat

Akses kesehatan yang terbatas menjadi penyebab masyarakat miskin tidak dapat menjaga kesehatan dirinya seperti sanitasi, gizi, pengobatan, dan lain-lain sehingga rentan terhadap penyakit.

3) Akses pendidikan terbatas

Kemiskinan menjadi penyebab seseorang untuk masuk dalam pendidikan karena biaya yang cukup tinggi, sehingga memperparah kondisi kemiskinan mereka.

4) Pengangguran meningkat

Karena akses pendidikan yang merak dapatkan terbatas, maka memberikan dampak berkelanjutan dari sulitnya mendapatkan pekerjaan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari penjelasan kemiskinan, terdapat dampak yang mempengaruhi penurunan tingkat kerja individu atau peningkatan terhadap pengangguran. Pengangguran adalah individu yang berusia 15 tahun ke atas namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan baik dalam mempersiapkan usaha, siap berusaha mencari pekerjaan atau belum mulai bekerja setelah diterima bekerja serta merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan. Dalam Marina & Putri (2019) pengangguran adalah kondisi individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja selama satu hari dalam satu minggu, atau individu yang sedang mencari pekerjaan yang lebih layak (Badan Pusat Statistik, 2025; Lazuardi & Santoso, 2024). Selain itu, definisi dari pengangguran terbuka yaitu mereka yang tidak bekerja karena beberapa faktor seperti ketidakinginan untuk bekerja secara permanen (karena merasa sudah makmur tanpa bekerja) dan faktor lain yaitu mereka yang telah berusaha mencari kerja namun tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan tersebut karena keterbatasan ketenagakerjaan karena proporsi yang tidak seimbang antara permintaan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan (Todaro, 1998).

Indikator dalam mengukur pengangguran tersebut menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan mengukur tingkat tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kondisi dimana pasokan kerja kurang termanfaatkan (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam Priyono & Chandra (2016) penyebab dari peningkatan pengangguran karena jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan kesempatan kerja pada pasar kerja. Hal ini lebih sering terjadi pada negara-negara berkembang dengan laju pertumbuhan pengangguran yang lebih cepat meningkat (Lazuardi & Santoso, 2024).

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Secara umum kesejahteraan mencakup pada perilaku dan tindakan manusia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Berarti bagaimana manusia dalam menggunakan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan

secara harfiah berarti keamanan dan keselamatan hidup. Dalam pengertiannya kesejahteraan termasuk dalam konsep dimana seseorang dapat dengan mudah dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan adalah suatu sistem yang sudah terorganisir pada pelayanan sosial dan lembaga dengan tujuan untuk membantu individu dalam mencapai standar hidup sehingga dapat meningkatkan mereka dalam mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan kebutuhan keluarganya (Medaline, 2017). Pengertian lain yang dijelaskan oleh Suharto (2005), yaitu keadaan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dasarnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Bustamam et al 2021).

Dalam pengertian kesejahteraan dapat dibagi menjadi tiga secara umum yaitu *classical utilitarian*, *neo classical*, dan *neo contractarian approach*, pengukuran kesejahteraan melalui kesenangan dan kepuasan dari individu. Pada tingkat kesenangan seseorang dari apa yang mereka rasakan dapat diukur secara kuantitatif. Pada konsep *neo classical welfare*, *pareto optimality* menjadi prinsip dalam mencapai kesejahteraan yang maksimal, selain itu fungsi dari kesejahteraan berarti fungsi dari kepuasan individu juga. Seiring waktu muncul konsep *new contractarian approach*, pendekatan yang menekankan pada rasionalitas individu dalam menerima kebebasan maksimum dalam hidupnya. Konsep ini melihat barang dan jasa dan tugas institusi sosial. Individu dalam memaksimalkan kebebasannya tentang barang dan jasa tanpa asanya campur tangan.

Kemudian pada teori utilitarian yang dikenalkan oleh Betham memiliki keterkaitan dari ketiga klasifikasi konsep kesejahteraan di atas. Utilitarian memiliki konsep bahwa ukuran

kebahagian dapat diukur dari benar atau salahnya kebijakan. Peran pemerintah dalam menciptakan efisiensi sangat penting dalam bisnis ekonomi dan pada aspek lainnya. Oleh karena itu kesejahteraan diukur melalui kebahagiaan yang diperoleh dari masyarakat (Widiarsih, 2021). Secara hukum, kesejahteraan sudah diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pada pasal 1 bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (BPK RI, n.d.).

Konsep pada kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang berbeda namun pada dasarnya sama pada substansinya (Medaline, 2017), cakupan konsepsi tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Institusi atau kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan dalam melakukan program kegiatan sejahtera.
- 3) Kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pada pandangan ekonomi islam secara menyeluruh dijadikan landasan dalam konsep kesejahteraan. Kesejahteraan dalam islam disebut dengan *masalahah* jika dilihat dari terminologi yang menjadi konsep yang komprehensif meliputi kehidupan manusia baik individu maupun kolektif. Berbeda dengan kesejahteraan konvensional, kesejahteraan islam memiliki tujuan yang holistik dan seimbang yang mencakup dimensi spiritual bukan hanya material yang mencakup individu maupun sosial. Selain itu tujuan dari kesejahteraan tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan di dunia melainkan akhirat menjadi tujuan kesejahteraan juga. Manusia tidak hanya hidup

di dunia tetapi juga di akhirat. Islam memiliki konsep dalam memenuhi kesejahteraan sosial dan individu dengan cara saling membantu, bukan kompetitif dan antagonistik.

Fungsi kesejahteraan sosial menurut islam berakar dari pemikiran oleh al Ghazali dalam socio ekonomi. Kesejahteraan memiliki konsep yang meliputi aktivitas dari individu maupun sosial. Pembahasan dari kesejahteraan sosial meliputi seluruh permasalahan, baik itu berupa manfaat maupun kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut maqashid syariah menjadi tujuan utama, al Ghazali menjelaskan kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan merupakan fungsi kesejahteraan dalam tingkat utilitas individu dan sosial yang tripastite, dimana masing-masing dari tingkat tersebut menjadi kunci dalam memelihara kesejahteraan tersebut, berawal dari terpenuhinya kebutuhan sebagai pemenuhan dasar dari individu. Lebih lanjut tujuan syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam upaya memenuhi perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan (Pusparini, 2015).

b. Pembangunan Manusia

Konsep kesejahteraan secara umum dapat dijelaskan salah satunya dengan tingkat pembangunan. Pembangunan merupakan upaya dari individu atau kelompok melalui proses sosial, ekonomi, dan institusional sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, terdapat tiga tujuan dalam pembangunan yaitu, (Todaro & Smith, 2006):

- 1) Peningkatan dalam ketersediaan serta penyaluran dalam kebutuhan dasar hidup seperti sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan.

- 2) Peningkatan kualitas hidup yang berupa pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas pendidikan.
- 3) Peningkatan pilihan sosial dan ekonomi. Individu berhak mendapatkan kesempatan atau kemampuannya dalam memilih sesuatu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan Manusia merupakan kemampuan manusia dalam menentukan pilihannya secara luas. Dalam menentukan pilihannya hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan hidup yang layak, akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Kemudian lebih lanjut mencakup kebebasan dalam berpolitik jaminan hak asasi manusia serta harga diri. Selain itu, pembangunan manusia merupakan penggabungan diantara proses distribusi barang dan perluasan kemampuan manusia untuk dimanfaatkan. Hal ini menjadi poin bahwa konsep tersebut menjelaskan seharusnya dimiliki, menjadi, dan dilakukan agar individu dapat menjamin kehidupannya sendiri (Alkire, 2010). Sementara itu Frances Stewart (2004) menjelaskan konsep pembangunan yang memiliki sifat dinamis dan mengalami perkembangan setiap waktunya. Pada awalnya pembangunan diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur utama dalam mengukur kesejahteraan secara menyeluruh (Stewart, 2004).

Pembangunan tidak hanya dijelaskan pada peningkatan pendapatan, melainkan terdapat faktor lain yang mencakup kesejahteraan manusia. Kesehatan, pendidikan, keamanan menjadi aspek lain dalam menilai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu pada konsep pembangunan memiliki kajian yang lebih luas dan komprehensif. Pendekatan yang lebih kompleks,

menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari satu aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilihat dari kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Stewart, 2004).

c. Indikator Pembangunan Manusia

Kesejahteraan bersifat multidimensional oleh karena itu diperlukan indikator sebagai alat ukur secara empiris. Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu individu ataupun masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Thomas Suyatno menjelaskan bahwa representasi masyarakat dari tingkat hidup seperti penurunan kemiskinan, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang tinggi, dan tingkat produktifitas menjadi ukuran keberhasilan dalam menilai ketercapaian kesejahteraan menengah ke bawah (Medaline, 2017). Selain itu, UNDP dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah merumuskan pembangunan manusia sebagai indikator. Pembangunan manusia sebagai perluasan bagi individu dalam meningkatkan kesempatan individu dalam mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penghasilan. Terdapat tiga dimensi dalam tolak ukur pembangunan manusia, diantaranya angka harapan hidup, literasi, dan rata-rata lama sekolah serta daya beli masyarakat. Selanjutnya kesejahteraan rakyat memiliki lima indikator yaitu, pendidikan, ketenagakerjaan, demografi, kesehatan, sosial lainnya (Alkire, 2010).

Tabel 2 1: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Nilai	Status
1	< 60	Rendah
2	$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
3	$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
4	$\text{IPM} \geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Terdapat tiga nilai inti dalam pembangunan dan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang diwujudkan pada berbagai manifestasi di hampir semua golongan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut (Todaro & Smith, 2006):

- 1) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut jika tidak dapat terpenuhi maka akan menghentikan kehidupan seseorang. Dengan tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar, maka akan muncul kondisi "keterbelakangan absolut"
- 2) Harga diri, menjadi manusia seutuhnya. Memiliki kehidupan yang lebih baik, dimana individu memiliki kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik dan dapat mengakses kebutuhan dasarnya tanpa ada kendala.
- 3) Kebebasan dalam kemampuan untuk memilih. Individu memiliki kebebasannya dalam memilih kebutuhan hidupnya. Sehingga dia bebas dalam menggunakan kemampuannya untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sedangkan dalam islam, indikator dalam terpenuhinya kesejahteraan yaitu dengan tercapainya masalah dan maqashid syariah, yaitu pemeliharaan yang meliputi agama, jiwa, akal atau pengetahuan, keluarga, dan hartanya. Kelima kebutuhan dasar tersebut menjadi ukuran yang kemudian menjadi rumusan *islamic poverty index* dalam mencapai kesejahteraan yang tidak hanya mengukur kemiskinan dan kesejahteraan secara finansial tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial (Pusparini, 2015).

4. Kebijakan Fiskal

a. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan maupun pengeluaran anggaran negara. Negara mengelola keuangan melalui kebijakan fiskal yang

terbatas pada penerimaan dan pengeluaran negara yang telah tertulis pada APBN. Penerimaan anggaran negara didapatkan melalui pajak penghasilan, pajak bumi, pajak bangunan, impor, non-pajak, pinjaman luar negeri, devisa, bea cukai, dan pariwisata. Sedangkan pada pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran mencakup pada biaya operasional, biaya pegawai, subsidi, belanja pembangunan atau proyek infrastruktur (Faturrahman, 2012).

Selain itu, kebijakan fiskal menjadi strategi pemerintah dalam mengelola hasil penerimaan anggaran dan pengeluaran untuk pemanfaatan dalam kegiatan ekonomi dengan efek jangka panjang. Tujuan dari kebijakan fiskal tidak lain adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian menjadi jauh lebih baik dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Selain itu tujuan lain dari kebijakan fiskal yaitu untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas anggaran. Dalam praktiknya penerapan kebijakan fiskal oleh negara melalui undang-undang berdampak pada pajak dan pengeluaran pemerintah (Fahrika et al., 2023).

Adapun dalam kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi diantaranya; 1) sebagai pengelola kebijakan ekonomi makro dan fiskal yaitu, dalam pencatatan nota RAPBN, kemudian analisis kebijakan dan evaluasi ekonomi, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. 2) fungsi penganggaran, meliputi persiapan, perumusan, pelaksanaan, kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang APBN. 3) Fungsi administrasi baik pajak maupun kepabeanan. 4) fungsi kebendaharaan. 5) fungsi pengawasan keuangan (Faturrahman, 2012).

Dalam konsep islam kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mengelola keuangan negara. Terdapat beberapa instrumen penting dalam kebijakan fiskal dalam islam (Faturrahman, 2012) diantaranya;

- 1) Pertumbuhan pendapatan serta partisipasi kerja: Pada zaman Rasulullah, perencanaan pembangunan dilakukan melalui strategi dengan mempererat persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar yang berpengaruh positif pada aktivitas ekonomi pada masa itu.
- 2) Kebijakan pajak: Dalam islam penerimaan pajak berupa kharaj, jizyah, khas , dan zakat. Dair penerimaan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas harga, pendapatna produksi, ketika permintaan menurun.
- 3) Anggaran: Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa Rasulullah menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 4) Kebijakan khusus: Prakteknya kebijakan khusus difungsikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mempertahankan produktifitas mereka.

b. Belanja Sosial

Dalam kebijakan fiskal terdapat instrumen kebijakan sosial salah satunya dialokasikan dalam bentuk belanja sosial pada aspek pengeluaran anggaran, terdapat Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, belanja sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat (JDIH BPK, n.d). Menurut Sendouw dkk. (2017) belanja sosial berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan pada

masyarakat baik dalam bentuk transfer uang maupun barang (Suharto, 2014).

Belanja sosial masuk dalam program pemerintah dalam anggaran perlindungan sosial. Tujuan dari adanya program perlindungan sosial yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah dan mampu mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* sehingga diharapkan dapat menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM pada jangka panjang (Kementrian Keuangan, 2024). Belanja sosial masuk kedalam salah satu jenis belanja pemerintah dalam klasifikasi ekonomi. Bentuk belanja sosial dapat berupa bantuan sosial konsumtif, produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga. Pada belanja bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakat. Sedangkan pada belanja produktif, ditujukan pada bantuan modal bagi masyarakat. Dan untuk belanja melalui lembaga diberikan dengan transfer uang, barang, atau jasa (Dharmakarja, 2017). Secara tradisional, belanja sosial memiliki fungsi dalam perlindungan sosial seperti pengangguran, penyakit, dan usia lanjut. Selain itu fungsi lain dari belanja sosial yaitu sebagai peningkatan produktivitas ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan (Santos & Simoes, 2025).

Pada umumnya belanja sosial diukur berdasarkan persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun Belanja sosial dianalisis tidak hanya melalui nilai besarnya pengeluaran, tetapi juga melalui proporsi atau komposisi terhadap total belanja pemerintah. Sejalan dengan World Bank (2020) yang menggunakan pendekatan proporsi belanja dengan menjelaskan sektor pengeluaran pada sektor sosial sebagai persentase atau komposisi terhadap total belanja pemerintah

untuk menggambarkan prioritas kebijakan fiskal (Adema, Fron, & Ladaique; World Bank, 2020).

c. Kapasitas Fiskal Daerah

Selain itu pada aspek pendapatan negara dapat dijelaskan dalam kapasitas fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan keuangan pada masing-masing daerah melalui ukuran pendapatan total dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, setelah dikurangi dengan pendapatan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah yang telah ditetapkan secara khusus (JDIH Kemenkeu, n.d.). Definisi lain dari Chitiga Mabugu (2013) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan dari setiap daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan relatif terhadap pengeluaran pada otoritas tertentu. Kapasitas fiskal memiliki dua pandangan yang dapat dilihat yaitu dari segi penerimaan dan pengeluaran. Pada penerimaan, hitungan dari kapasitas fiskal daerah yaitu dari keseluruhan pendapatan daerah dan upaya dalam memperoleh pendapatan daerah. Selanjutnya dari pengeluaran, merupakan nilai ukur dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan menggunakan indeks kapasitas fiskal sehingga dapat mengevaluasi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal, sehingga pelayanan publik menjadi lebih merata (Kusuma & Iskandar, 2022).

Indeks kapasitas fiskal dibagi menjadi empat yaitu, 1) kapasitas fiskal sangat tinggi, 2) kapasitas fiskal tinggi, 3) kapasitas fiskal sedang, dan 4) kapasitas fiskal rendah. Terdapat dua komponen pada indeks kapasitas fiskal yaitu, pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah. Pada pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan dari pengumpulan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan lain-lain yang telah diatur sesuai

dengan perundang-undangan. Belanja daerah yaitu pengurangan terhadap nilai kekayaan bersih dari periode tahun anggaran sebagai kewajiban daerah. Tujuan dari belanja daerah yaitu untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah (Bawono et al., 2017). Dalam Brojonegoro (2003) menjelaskan terdapat dua sumber penghasilan daerah pada masa desentralisasi daerah yaitu, 1) dana yang ditranfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (pajak dan non-pajak), 2) dana yang berasal dari pendapatan asli daerah, dihasilkan dan digunakan dari masing-masing daerah sesuai dengan potensinya berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Kinerja keuangan daerah masih pada posisi yang sulit dalam implementasinya, dalam Sidik (2002) terdapat permasalahan utama yang menyebabkan efektivitas desentralisasi daerah rendah. Pertama, ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Kedua, kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui potensi dari sumber daya daerah. Ketiga, efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah, hal ini ditujukan pada besaran proporsi anggaran yang dikeluarkan untuk operasional terhadap anggaran yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Tikha Q.A. & Sujarwoto, 2015).

Terdapat pendekatan dalam perhitungan kapasitas fiskal dalam implelementasinya diantaranya yaitu (Herdiyana, 2019; JDIH, 2024):

- 1) Pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kapasitas fiskal daerah dialokasikan pada dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang

bersumber dari dana APBN kemudian dialokasikan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan antar daerah.

- 2) Kemampuan fiskal daerah ditujukan untuk menghitung dana alokasi khusus, terdapat dalam pasal UU Nomor 1 Tahun 2022.
- 3) Kemampuan fiskal daerah digunakan dalam perencanaan dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, diatur dalam Perpres Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

c) Hipotesis

1. H1: Zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
2. H2: Belanja sosial memoderasi pengaruh zakat terhadap kemiskinan.
3. H3: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
4. H4: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
5. H5: Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian digunakan pendekatan dan metode penyusunan agar pelaksanaan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur sehingga peneliti dapat melakukan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kasual (eksplanatif) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat, IPM, TPT terhadap kemiskinan dengan moderasi IKF serta membandingkan zakat terhadap variabel belanja sosial pada kemiskinan analisis menggunakan metode regresi moderasi. Adapun penyusunan penelitian yaitu;

A. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perencanaan dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi umum hingga metode yang lebih rinci tentang pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai strategi penelitian yang memberikan arahan spesifik bagi prosedur dalam sebuah studi penelitian. Menurut Creswell (2018) penelitian kuantitatif adalah pendekatan dalam upaya menguji beberapa teori objektif dengan cara menelaah hubungan diantara variabel-variabel. Variabel kemudian diukur melalui instrumen sehingga dapat menghasilkan data yang berupa numerik yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Penelitian menggunakan secara deduktif terhadap asumsi pada pengujian teori, membangun agar terhindar dari bias, mengendalikan kemungkinan penjelasan alternatif, dan melakukan generalisasi dan replikasi terhadap temuan (Creswell & Creswell, 2018). Oleh karena itu pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan moderasi belanja sosial menggunakan data sekunder menggunakan regresi linear berganda data panel dengan moderasi.

B. Waktu Penelitian

Proses penelitian skripsi dilaksanakan pada bulan Juni 2025 hingga Maret 2026. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder dengan periode pengamatan pada tahun 2019 – 2024.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah salah satu instrumen penting dalam sebuah penelitian sebagai variabel analisis. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini mencakup pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan variabel moderasi pada 8 provinsi di Indonesia, seperti data pada kemiskinan, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Riau. Selain itu terdapat variabel kontrol yang berfungsi dalam mengendalikan pengaruh kemiskinan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan manusia (IPM), dan belanja sosial.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah subjek penelitian secara keseluruhan. Penelitian populasi dapat dijelaskan apabila yang dilakukan oleh peneliti mencakup keseluruhan elemen pada suatu wilayah penelitian. Lebih lanjut dijelaskan pada *Encyclopedia of Educational Evaluation* bahwa populasi diartikan sebagai suatu kumpulan dari seluruh objek yang memiliki satu atau lebih dari karakteristik yang mendefinisikan kelompok (Arikunto, 1998). Kemudian pada penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34-38 provinsi pada periode 2019-2024. Pada penelitian terdapat keterbatasan ketersediaan dan konsistensi data pada tingkat regional, sehingga dalam menentukan sampel pada penelitian akan menggunakan metode *purposive sampling*.

2. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian yang diambil sebagai objek penelitian dari satu populasi. Dalam praktiknya sampel dapat

memberikan kesimpulan yang dapat menggambarkan hasil dari satu populasi yang telah diteliti (Arikunto, 1998). Pada penelitian digunakan *purposive sampling* sebagai metode dalam menentukan sampel dari populasi. *Purposive sampling* didasarkan pada tujuan tertentu dalam menentukan sampel yang akan diteliti seperti karakteristik atau sifat (Arikunto, 1998). Dalam pengambilan data peneliti mengambil delapan provinsi sebagai sampel yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan *purposive sampling*. Data yang dijadikan sampel didasarkan pada ketersediaan data yang terintegrasi pada variabel pengeluaran zakat, TPT, IPM, IKF, kemiskinan, dan belanja sosial pada periode tahun 2019-2024 serta relevansi terhadap tujuan penelitian. Meskipun 8 provinsi tidak dapat merepresentasikan seluruh wilayah di Indonesia, namun pada pemilihan 8 provinsi tersebut memiliki kontributor utama dan penghimpun zakat, sehingga dapat mempengaruhi nilai pada kebijakan pengelolaan yang strategis.

E. Sumber Data

Penelitian memerlukan sumber data sebagai salah satu unsur dalam penelitian yang penting sehingga dapat dilakukan analisis. Peneliti menggunakan sumber data yang telah dikumpulkan untuk diolah kemudian mendapatkan hasil atau kesimpulan pada topik pembahasan adapun data yang diambil yaitu pengeluaran zakat, rasio belanja sosial yang telah dihitung secara manual, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), dan kemiskinan. Peneliti mengambil jenis sumber data sekunder dalam penyusunan penelitian dari lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu. Data yang diambil berupa internal data yaitu, data yang berasal dari data sekunder, seperti buku laporan perusahaan kemudian

eksternal data yaitu data yang diambil dari sumber luar, seperti data sensus. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua (Bungin, 2005).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting dalam tahapan penelitian yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi data resmi, dimana metode ini mengambil data dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengolah data historis yang bersumber dari dokumen resmi lembaga terkait (Bungin, 2005). Jenis data sekunder berupa data kuantitatif panel (*time series* dan *cross section*) yang diperoleh dari sumber luar. Data yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah maupun lembaga terkait.

G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel adalah atribut atau karakteristik yang dapat diukur untuk menemukan hubungan atau pengaruh antar variabel dalam penelitian. Fungsi dari variabel yaitu untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk numerik, ordinal, interval, dan rasio yang kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan (Waruwu et al., 2025). Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Pada masing-masing variabel dijelaskan melalui definisi konseptual dan definisi operasional sebagai berikut.

1. Variabel Dependen: Kemiskinan

a. Definisi Konseptual

Kemiskinan adalah kondisi individu atau rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Dalam konteks makro diukur pada proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan.

b. Definisi Operasional

Kemiskinan diukur menggunakan persentase dari penduduk dibawah garis kemiskinan periode 2019-2024 pada masing-masing provinsi.

2. Variabel Independen Zakat

1. Definisi Konseptual

Zakat adalah instrumen keuangan islam melalui redistribusi kekayaan dari muzakki ke mustahik dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan.

2. Definisi Operasional

Zakat diukur berdasarkan jumlah total penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS periode 2019-2024 pada masing-masing provinsi.

3. Variabel Moderasi: Belanja Sosial

a. Definisi Konseptual

Belanja sosial adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui program pendidikan, kesehatan serta pelayanan lainnya.

b. Definisi Operasional

Belanja sosial diukur berdasarkan dari total realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk pelayanan sosial per provinsi per tahun

4. Variabel Kontrol

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Definisi Konseptual

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi yang berbeda, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan kapasitas individu dalam produktivitasnya menjalani hidup.

2) Definisi Operasional

IPM diukur melalui tingkat kualitas individu pada tiga aspek dimensi yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1) Definisi Konseptual

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi terhadap angkatan kerja yang aktif dalam mencari kerja. TPT mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dengan penerimaan tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah.

2) Definisi Operasional

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur melalui jumlah angkatan kerja yang aktif mencari kerja dengan yang tidak bekerja.

c. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

1) Definisi Konseptual

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah daya dukung dari kebijakan fiskal daerah dicerminkan melalui kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pengeluaran publik dan pelayanan sosial.

2) Definisi Operasional

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) diukur menggunakan nilai KFD provinsi melalui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja publik.

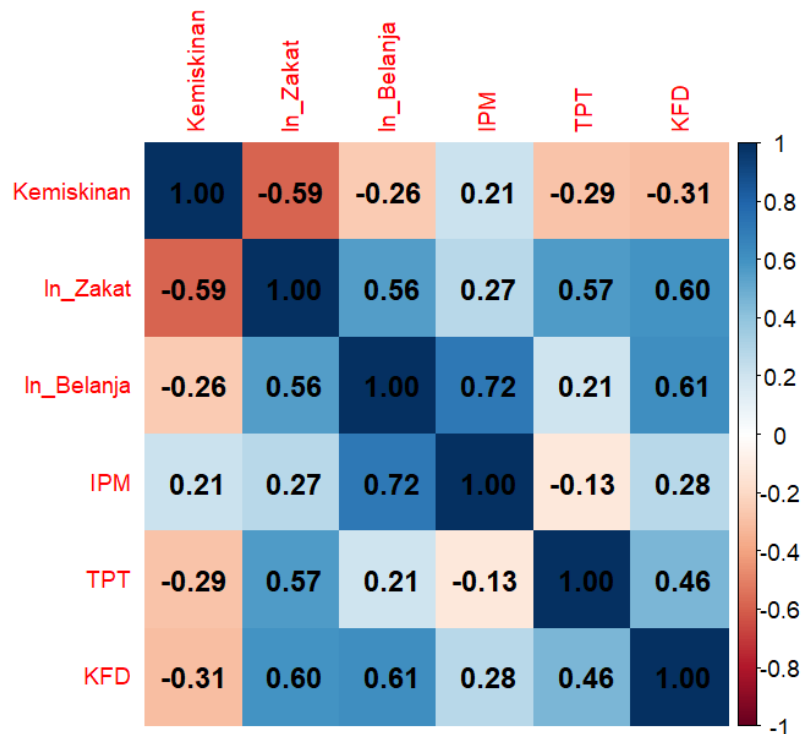
H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu bagian penting dari sebuah penelitian, fungsi dari instrumen yaitu menentukan arah penelitian baik penentuan dalam memperoleh data penelitian maupun konsep penelitian (Bungin, 2005). Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi dan publikasi data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi yaitu publikasi statistik, laporan tahunan, dan database daring yang sudah terstandarisasi sehingga sudah terjamin validitas dan realibitasnya oleh lembaga penerbit.

Instrumen pada penelitian ini meliputi:

1. Kemiskinan (Y): Instrumen berupa data tingkat kemiskinan (pesentase penduduk miskin) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat.
2. Pengeluaran Zakat (X1): Instrumen berupa laporan pengeluaran zakat yang dipublikasikan melalui laporan keuangan BAZNAS.
3. Rasio Belanja sosial (M): Instrumen belanja sosial dipublikasikan oleh Kemenkeu, namun pada rasio dihitung secara manual dengan membagi belanja sosial dengan total realisasi pengeluaran belanja negara.
4. Indeks Pembangunan Manusia (X1): Instrumen IPM di publikasikan oleh BPS.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2): Instrumen TPT dipublikasikan oleh BPS.
6. Kapasitas Fiskal Daerah (X3): Instrumen dipublikasikan oleh Kemenkeu.

Gambar 3.1: Heatmap Hubungan Antara Variabel



Sumber: R Studio

Heatmap ini menggambarkan matriks korelasi antar variabel: Kemiskinan, $\ln_Zakat$, $\ln_Belanja$, IPM, TPT, dan KFD.

1. Kemiskinan berkorelasi negatif dengan $\ln_Zakat$ (-0,59). Artinya: semakin tinggi zakat, semakin rendah tingkat kemiskinan.
2. Kemiskinan juga berkorelasi negatif dengan $\ln_Belanja$ (-0,26), TPT (-0,29), dan KFD (-0,31). Maknanya, ini menunjukkan arah hubungan yang konsisten menekan kemiskinan.
3. IPM justru berkorelasi positif dengan kemiskinan (0,21), meskipun relatif lemah. Ini bisa jadi karena perbedaan antar provinsi (IPM tinggi belum otomatis menurunkan kemiskinan).
4. $\ln_Zakat$ berkorelasi positif dengan $\ln_Belanja$ (0,56), TPT (0,57), dan KFD (0,60). Artinya: zakat cenderung meningkat seiring belanja sosial dan kapasitas fiskal.
5. $\ln_Belanja$ memiliki korelasi kuat dengan IPM (0,72), ini berarti belanja sosial berperan besar dalam meningkatkan kualitas manusia.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menguji signifikansi pengaruh tersebut berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*) (Bungin, 2005). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kuantitatif deskriptif sebagai pendukung dalam menjelaskan secara umum pada karakteristik data penelitian. Estimasi model menggunakan robust standar error (*arellano*) pada data panel untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi (Hill & Campbell, 2012). Penelitian menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat penelitian software statistika, R studio dalam melakukan analisis data untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian melalui pengolahan data numerik. Tujuan dari analisis data untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pengeluaran zakat) terhadap variabel dependen (kemiskinan) dengan intervensi variabel moderasi (belanja sosial)

serta variabel kontrol (IPM, TPT, dan KFD) untuk menghindari bias dalam model penelitian.

Data panel menjadi model yang digunakan pada penelitian ini, yaitu gabungan antara data *time-series* dengan *cross-section*. Pemilihan data panel bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan menambah nilai drajat kebebasan pada estimasi model.

1. Tahapan Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Menggambarkan karakteristik dari data yang telah dikumpulkan dari variabel pengeluaran zakat, belanja sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dan Kemiskinan yang meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Analisis Statistik Deskriptif adalah teknik yang menggambarkan secara umum mengenai data yang telah dikumpulkan (Bungin, 2005).

b. Transformasi Data (ln)

Variabel yang memiliki angka tinggi, ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk mengurangi nilai data sehingga dapat berpengaruh terhadap uji heteroskedastisitas, multikolinearitas kemudian dapat menstabilkan data, dan mempermudah interpretasi elastisitas. Variabel data yang ditransformasi yaitu zakat dan belanja sosial. Data dapat ditransformasikan menggunakan logaritma natural dengan tujuan untuk menstabilkan varians, mengurangi *skewness*, dan mendekati distribusi normal (West, 2022)

c. Data Centering

Variabel belanja sosial dan zakat dilakukan data centering untuk mengurangi nilai variabel dengan dikurangi oleh rata-ratanya. Hal tersebut dilakukan agar menghindari multikolinearitas yang tinggi sehingga model yang dibuat menjadi stabil. Penjelasan

Irwin dan Clelland (2001), data *centering* pada variabel dapat membantu proses analisis data. Sebelum menghitung *interaction terms* dalam menguji efek moderasi regresi berganda (Dawn, Schneider, Popovich, & A, 2017)

d. Pemilihan Model

Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian untuk menemukan model yang tepat sehingga dapat melanjutkan penelitian dengan pengujiannya sebagai berikut (Hill & Campbell, 2012);

- 1) Uji Chow, memilih model yang tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).
- 2) Uji Hausman, memilih model yang tepat diantara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).
- 3) Uji lagrange Multiplier, memilih model yang tepat diantara CEM dan REM.

e. Uji Cross Section Dependence

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada variabel observasi terdapat ketergantungan antar wilayah dengan hipotesis (Baltagi, 2012)

H0: antar wilayah tidak saling ketergantungan

H1: antar wilayah saling ketergantungan

f. Goodfitness of fit

Mengukur efektivitas model dalam menjelaskan variabel dependen (Hill & Campbell, 2012). Pada penelitian ini nilai dari *Goodness of Fit* dapat dilihat melalui nilai koefisien (R-Squared) untuk menjelaskan proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian Adjusted R-Squared berfungsi untuk mengetahui estimasi yang lebih akurat dengan pertimbangan jumlah variabel, serta uji F-statistik.

g. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan guna memastikan model yang digunakan memenuhi kriteria meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

h. Uji Robustness

Kemudian melakukan pengujian robusnest untuk mengetahui konsistensi dari estimasi model yang telah digunakan. Dalam bukunya *Economic of Analysis Data Panel* oleh Hill & Campbell tujuan dari pengujian robustness adalah untuk memastikan estimasi dari sebuah model tidak sensitif terhadap perubahan metode estimasi, pemilihan variabel, dan spesifikasi model. Kemudian dalam model data panel uji robust, apabila setelah dilakukan perubahan dalam pendekatan estimasi hasilnya telah memenuhi estimasi yang konsisten saat baik dalam arah koefisien maupun signifikansi (Hill & Campbell, 2012).

Uji robustness dilakukan pada konteks penelitian ini digunakan pada perubahan spesifikasi model alternatif yang bertujuan untuk melihat konsistensi estimasi terhadap model utama.

i. Uji Hipotesis

Prosedur statistik untuk menguji kebenaran terhadap dugaan sementara yang sudah dirumuskan sebelumnya. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel data bersifat signifikan berdasarkan statistik atau hanya sebatas kebetulan (Baltagi, 2013; Bungin, 2005).

Dalam penelitan ini, hipotesis diuji menggunakan analisis regresi data panel, pengujian dilakukan dengan uji parsial (t) dan uji simultan (F). Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara mandiri terhadap variabel dependen. William H. Greene menjelaskan, uji-t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial.

Kriteria dalam pengujian uji t yaitu:

- 1) Jika nilai probabilitas (*p-value*) < 0.05 , maka hipotesis diterima, berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai probabilitas (*p-value*) > 0.05 maka hipotesis ditolak.

Kemudian pada uji-F berfungsi untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen (Bungin, 2005).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini berfokus pada 8 provinsi di Indonesia yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan konsistensi data dengan kriteria khusus seperti laporan pengeluaran zakat serta data makroekonomi dengan rentang waktu 6 tahun, yaitu pada periode 2019 hingga 2024. Adapun provinsi yang dipilih yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Dki Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. Dari ke delapan provinsi tersebut dijadikan representatif dalam penelitian karena mencakup wilayah dengan aktivitas pengelolaan zakat yang aktif di Indonesia dan melihat pengaruh zakat terhadap kemiskinan yang dimoderasi oleh variabel rasio belanja sosial. mengenai hasil dari penelitian menggunakan subjek 8 provinsi di Indonesia yaitu untuk memberikan gambaran secara empiris kemudian untuk mengetahui sejauh mana interaksi dari peran instrumen zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan mengintervensi variabel kebijakan fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel sederhana *time series* dan *cross-section* dengan total sebanyak 48 observasi. Data yang dianalisis meliputi pengeluaran zakat, tingkat kemiskinan terbuka, indeks kapasitas fiskal, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan belanja sosial. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mencerminkan heterogenitas pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas zakat dan kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan. Jika dilihat dari data tahun 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia per-maret berada diangka 8,57 persen kemudian jika dilihat secara spesifik pada 8 provinsi yang menjadi subjek penelitian,

masing-masing provinsi memiliki persentase dengan variasi yang cukup besar (BPS, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan suatu negara. Pada tahun 2024 Indonesia mengalami peningkatan pada nilai IPM dari tahun 2023 sebesar 73,93 dengan tahun 2024 sebesar 75,02 (BPS, 2025). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, meskipun ketimpangan masih terjadi di setiap wilayah.

Tabel 4 1: Nilai Rata-rata Variabel Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Zakat (milyar rupiah)	IPM	Kemiskinan (%)	TPT	Belanja Sosial (%)	KFD
1	Sumatera Utara	11,63	72	8	5.7	0.3	1.59
2	Sumatera Barat	25,2	73	6	5.9	0.19	0.92
3	DKI Jakarta	139,8	81	4	7.2	7.3	4.64
4	Jawa Barat	35,89	72	7	8.2	0.7	3
5	DI Yogyakarta	4,44	80	11	3.7	0.7	0.8
6	Banten	21,06	73	5	8.1	0.4	1.7
7	Kalimantan Selatan	8,45	71	4	4.2	0.5	1.6
8	Riau	28,81	73	6	4.7	0.4	1.6

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2024

Kemudian pada aspek ekonomi pada kebijakan fiskal, kapasitas fiskal daerah (KFD) memiliki rata-rata 1,7 pada tahun 2024. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan,

tingkat kapasitas fiskal yang tinggi mempengaruhi kinerja pembangunan daerah termasuk didalamnya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penganggaran yang dikeluarkan dalam belanja sosial dan ekonomi produktif. Sebaliknya tingkat kapasitas fiskal yang rendah tidak dapat mendukung aktivitas pembangunan daerah secara maksimal, sehingga masih bergantung pada bantuan pusat. Dengan kategori sedang tersebut pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang proposional namun tetap memiliki tantangan dalam mengatur anggaran agar tetap seimbang antara pengeluaran beban operasional birokrasi dengan kebutuhan penyaluran bantuan sosial.

Selain itu pada belanja sosial Indonesia menetapkan anggaran sebesar 496,8 triliun untuk dialokasikan pada perlindungan sosial. Angka tersebut naik hingga 13,1 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 439,1 triliun. Perlindungan sosial merupakan upaya intervensi pemerintah sebagai tindakan preventif untuk mencegah berbagai macam resiko dan kerentanan yang diakibatkan oleh bencana, siklus hidup, guncangan keadaan sosial dan ekonomi, dan keadaan disabilitas terutama bagi warga miskin dan rentan.

Kemudian data berdasarkan setiap tahun dengan rentang 2019-2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 2: Nilai Rata-Rata Variabel Berdasarkan Tahun

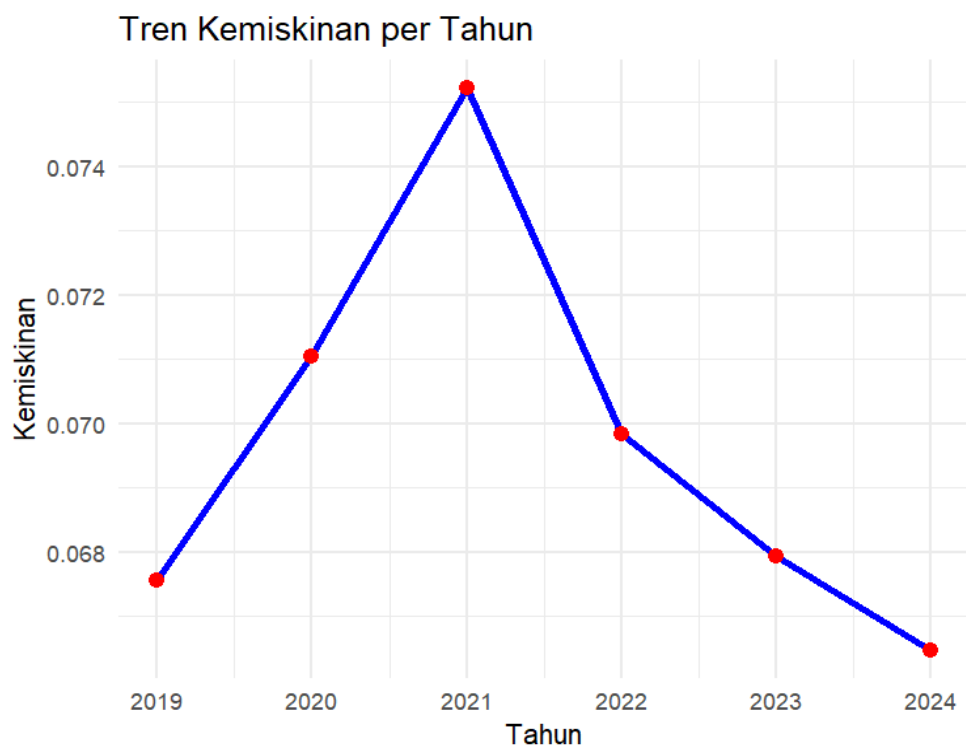
No	Tahun	Zakat (Milyar Rupiah)	IPM	Kemiskinan (%)	TPT	Rasio Belanja Sosial (%)	KFD
1	2019	21,04	74.13	6	5.6	1.1	1.1
2	2020	26,71	74.13	7	6.5	1.4	1.9
3	2021	33,1	74.42	7	6.6	1.8	2.4
4	2022	39,74	75	6.98	6.1	1.4	2.2
5	2023	40,18	75	6.79	5.7	0.9	2.2

6	2024	45,7	75	6.65	5.2	1	2.0
---	------	------	----	------	-----	---	-----

Sumber: Data Pusat Statistik 2019-2024

Dari gambaran umum karakteristik pada wilayah subjek penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kaitan erat antara pengeluaran zakat, IPM, KFD, belanja sosial terhadap pengentasan kemiskinan dan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 8 provinsi. Hal tersebut menjadi landasan mengapa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan mengintervensi kebijakan fiskal yaitu rasio belanja sosial dengan tujuan untuk memastikan signifikansi melalui interaksi pengeluaran zakat dengan variabel moderasi. Lebih jelas perhatikan gambar grafik tren kemiskinan per tahun berikut ini.

Gambar 4.1: Tren Kemiskinan Selama 6 Tahun



Sumber: R-Studio

Oleh karena itu, pada bagian berikutnya peneliti akan menjelaskan hasil dan pembahasan analisis menggunakan model fixed effect pada data panel dan cross-section dalam mengaitkan antara zakat dengan kemiskinan serta

rasio belanja sosial sebagai moderasi berdasarkan hasil pengolahan data panel selama periode penelitian dengan 8 provinsi di Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Statistik Deskripsi

Penelitian menggunakan data sekunder berbentuk data panel (*cross-section* dan *time-series*) dengan sampel 8 provinsi di Indonesia selama 6 tahun (2019-2024). Perolehan data berasal dari lembaga resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan gambaran umum perihal karakteristik dari data yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini statistik deskriptif meliputi rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dari masing-masing variabel pada penelitian.

Hasil uji deskriptif menunjukkan variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.06 dengan nilai minimum 0.03, nilai maksimum 0.12 dan nilai median 0.06. hal ini tidak menunjukkan variasi yang cukup beragam pada tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu penelitian. Pada nilai standar deviasi menunjukkan penyebaran data yang relatif kecil berdasarkan rata-rata dengan nilai 0.02.

Pada variabel zakat sebelum melakukan uji deskriptif, dilakukan logaritma natural dan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 23.68, nilai minimum 21.85, nilai maksimum 25.92, dan median 23.76. dari nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel zakat memiliki kecenderungan perbedaan dalam pendistribusian zakat antar daerah dan waktu penelitian. Sedangkan pada standar deviasi memiliki nilai 1.06, menunjukkan tingkat variasi distribusi zakat yang sedang.

Selanjutnya pada variabel moderasi belanja sosial, dilakukan logaritma natural dan menunjukkan nilai rata-rata -5.13, nilai minimum -6.66, nilai maksimum -2.24, dan nilai median -5.38. dari data tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung berbeda-beda. Nilai pada standar deviasi menunjukkan variasi distribusi belanja sosial pemerintah daerah dengan nilai 1.06 yaitu memiliki tingkat yang sedang.

Kemudian variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki rata-rata sebesar 3.74, nilai minimum 70.72, nilai maksimum 83.08, dan nilai median 73.29. hal ini menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat kualitas sumber daya manusia pada setiap daerah dan waktu. Standar deviasi menunjukkan angka 3.74. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.99, nilai minimum 3.03, nilai maksimum 9.37, dan nilai median 5.81. dari nilai tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan variasi pada tingkat pengangguran pada setiap daerah dan waktu yang dapat mempengaruhi kemiskinan.

Terakhir yaitu variabel Kapasitas Fiskal Daerah, memiliki nilai rata-rata 2.01, nilai minimum 0.26, nilai maksimum 11.39, nilai median 1.43. hal tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan fiskal yang cukup tinggi antar daerah dalam membiayai pembangunan. Pada standar deviasi menunjukkan tingkat yang tinggi dengan angka 1.82.

Tabel 4 3: Nilai Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Median	Rata-rata	Std
Kemiskinan	0.03	0.12	0.06	0.06	0.02
ln_Zakat	21.85	25.92	23.76	23.68	1.06
ln_Belanja	-6.66	-2.24	-5.38	-5.13	1.06
IPM	70.72	83.08	73.29	74.92	3.74

TPT	3.03	9.37	5.81	5.99	1.76
KFD	0.26	11.39	1.43	2.01	1.82

Sumber: R-Studio

b. Hasil Analisis Inferensial

Analisis data panel dilakukan untuk menguji pengaruh variabel zakat, belanja sosial, dan IKF serta variabel kontrol terhadap kemiskinan selama periode 6 tahun (2019-2023). Pemilihan data panel bertujuan untuk mencakup dimensi waktu *time-series* dan wilayah *cross-section* secara bersamaan, sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat jika dibandingkan hanya menggunakan satu jenis model data.

1) Pemilihan Model

Model dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu model *fixed effect* regresi data panel dengan rumusan umum seperti;

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{it} + \beta_2 Z_{it} + \beta_3 (X_{it} \times Z_{it}) + \beta_4 C1_{it} + \beta_5 C2_{it} + \beta_6 C3_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

- a) Y_{it} = tingkat kemiskinan provinsi ke-i pada tahun ke-t
- b) X_{1it} = pengeluaran zakat (miliar rupiah)
- c) Z_{it} = rasio belanja sosial
- d) $X_{1it} * Z_{it}$ = interaksi zakat dan belanja sosial (moderasi)
- e) $C1_{it}$ = indeks pembangunan manusia
- f) $C2_{it}$ = tingkat pengangguran terbuka
- g) $C3_{it}$ = kapasitas fiskal daerah
- h) ε_{it} = *error term*

Dalam menentukan model terbaik, hingga pada analisis tidak terjadi bias dan efisien pada estimasi, oleh karena itu diperlukan sebuah model yang tepat. Terdapat tiga model dan salah satunya akan menjadi model pada penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

a) *Common Effect Model* (CEM)

Berasumsi bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik yang sama dan setiap individu digabungkan tanpa memperhitungkan perbedaan waktu dan individu (Hill & Campbell, 2012). untuk setiap individu sehingga tidak mempertimbangkan perbedaan individu provinsi.

b) *Fixed Effect Model* (FEM)

Memasukan *intercept* khusus pada setiap provinsi untuk melihat adanya perbedaan karakteristik (Hill & Campbell, 2012). Model ini cocok ketika antar variabel memiliki nilai yang signifikan.

c) *Random Effect Model* (REM)

Pada setiap provinsi dianggap bersifat acak dan tidak memiliki korelasi dengan variabel independen (Hill & Campbell, 2012). Model ini berasumsi bahwa indikasi eror terjadi apabila terdapat variasi antar individu, sehingga model ini lebih tepat dan efisien dibandingkan dengan model FEM apabila asumsi tersebut telah terpenuhi.

Untuk mengetahui model yang tepat dan efisien maka diperlukan uji analisis dalam memilih model, terdapat pengujian yaitu uji chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian tersebut sebagai berikut:

a) Uji Chow

Untuk menentukan model yang tepat antara *common effect* dengan *fixed effect* maka diperlukan uji chow. Hasil dari uji tersebut yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. dari nilai tersebut maka *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan *common effect*.

b) Uji Hausman

Setelah melakukan uji chow, kemudian melakukan uji hausman untuk melihat model mana yang lebih tepat digunakan antara fixed effect dengan random effect (Hill & Campbell, 2012). Hasil menunjukkan nilai Prob (*chi-square*) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. model yang lebih tepat digunakan adalah fixed effect model (FEM) karena terdapat korelasi error dengan variabel independen.

Dengan demikian, pada analisis selanjutnya akan digunakan *fixed effect* sebagai model yang paling tepat untuk melakukan analisis interpretasi koefisien dan tidak perlu melakukan uji Lagrange Multiplier karena pada uji chow dan uji Hausman membuktikan bahwa *fixed effect* merupakan model terbaik. Kemudian pada model *fixed effect* dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis karena dapat menangkap heterogenitas antar provinsi yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

2) *Mean Centering*

Sebelum dibentuk menjadi variabel interaksi, dalam penelitian ini dilakukan prosedur *mean centering* terhadap variabel pengeluaran zakat dan rasio belanja sosial. Pada setiap variabel observasi nilai rata-rata dari masing-masing variabel tersebut dikurangi.

Prosedur *mean centering* bertujuan untuk mengatasi masalah multikolinearitas yang tinggi terutama pada model yang menggunakan regresi moderasi. Berdasarkan pasca uji *centering* nilai VIF menunjukkan angka di bawah 10, sehingga model terhindar dari nilai tinggi pada multikolinearitas serta memberikan koefisien interaksi yang lebih akurat.

3) *Uji Cross-section Dependence*

Uji *cross-section dependence* bertujuan untuk mengetahui ketergantungan antar wilayah observasi, dengan hipotesis (Baltagi 2012):

H0 = antar wilayah tidak saling ketergantungan

Ha = antar wilayah saling ketergantungan

Berdasarkan uji analisis, menunjukkan nilai Z sebesar 1,635 dan nilai *p-value* sebesar 0,102. Nilai *p-value* menunjukkan angka yang lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga hipotesis H0 diterima sehingga tidak adanya ketergantungan antar wilayah. oleh karena itu model ini tidak terdapat masalah pada cross section dependence.

4) Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut pada estimasi, model perlu diuji dengan melakukan asumsi dasar regresi yaitu:

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi tinggi antar variabel independen. Korelasi yang rendah atau tidak memiliki hubungan linear yang tinggi dikatakan sebagai model yang baik dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah angka 10.

Tabel 4 4: Nilai Variabel Independen Uji Multikolieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Zakat	2,358	Bebas Multikolinearitas
Rasio	5,776	Bebas Multikolinearitas
Interaction	4,439	Bebas Multikolinearitas
IPM	2,507	Bebas Multikolinearitas
TPT	1,812	Bebas Multikolinearitas
KFD	2,082	Bebas Multikolinearitas

Sumber: R Studio

Berdasarkan nilai pada tabel di atas, setelah dilakukan log *numbering* pada variabel zakat dan rasio belanja sosial serta dilakukan *mean centering* pada variabel pengeluaran zakat, rasio belanja sosial, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, kapasitas fiskal daerah, dan kemiskinan memiliki nilai di bawah 10, maka tidak terdapat multikoleniaritas antar variabel individu.

b) Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas ditunjukkan untuk memastikan apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal pada model regresi. Pada penelitian menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui normalitas pada residual pada model fixed effect.

Tabel 4 5: Nilai Uji Normalitas

Metode Uji	Nilai Statistik	P-Value	Keterangan
Shapiro-Wilk	0,9976	0,4833	Distibusi Normal

Sumber: R- Studio

Dari tabel di atas, hasil pada uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai statistik 0,9976 dengan p-value dengan nilai 0,4833. Berdasarkan hasil tersebut H_0 diterima, karena p value memiliki nilai lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa residual dalam model penelitian ini terdistribusi normal. hal ini menunjukkan bahwa estimasi parameter tidak mengalami bias dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lain terdapat ketidaksamaan varians. Heteroskedastisitas untuk mengetahui standar error untuk menghindari bias dari estimasi koefisien, hasil yang konsisten dengan hasil yang efisien yaitu regresi dapat terdistribusi secara homogen (Baltagi, 2013). Model dengan hasil varian residual yang konstan adalah model yang baik untuk dilakukan uji lebih lanjut. Penelitian menggunakan uji *studentized breusch-pagan* untuk mengetahui hasil varians tersebut.

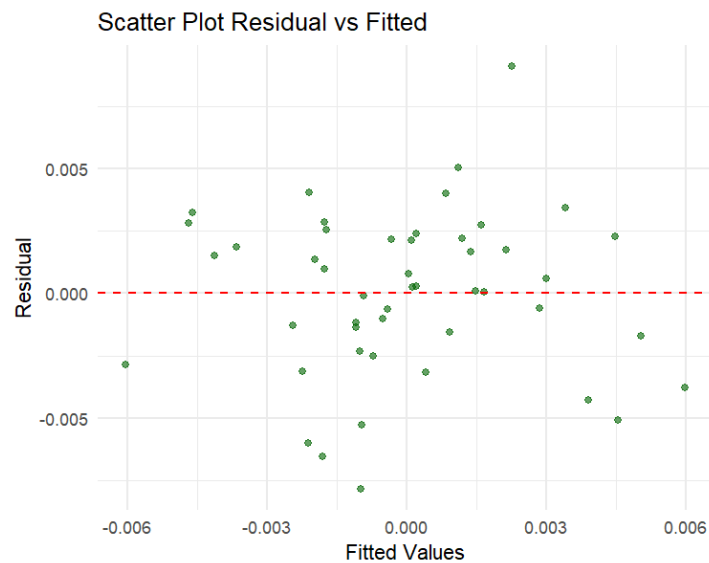
Tabel 4 6: Nilai Uji Heteroskedastisitas

Metode	Nilai Statistik	p-Value	Keterangan
Breusch-pagan	10,492	0,1054	Homoskedastisitas

Sumber: R-Studio

Pada tabel di atas menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,1054. Nilai *p-value* tersebut lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga model regresi ini tidak mengalami masalah pada heteroskedastisitas. Karena varians bersifat konstan pada seluruh variabel, maka asumsi ini sudah terpenuhi.

Gambar 4.1: Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: R Studio

d) Uji autokorelasi

Untuk mengetahui korelasi antar anggota observasi yang telah diurutkan berdasarkan waktu, maka digunakan uji autokorelasi. Untuk mengetahui hubungan koefisien antar waktu variabel maka diperlukan uji autokorelasi serial (Bungin, 2005). Jika pada varian tidak berada pada angka minimum maka terjadi autokorelasi terhadap anggota observasi, hal ini akan berpengaruh pada uji signifikan yang tidak akurat.

Tabel 4.7: Nilai Uji Autokorelasi

Metode Pengujian	Chi-Squared	P-Value	Keterangan
Breusch-godfrey	12,074	0,0603	Bebas autokorelasi

Sumber: R-Studio

Berdasarkan pada tabel di atas *p-value* memiliki nilai 0,603. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan

$\alpha = 0,05$ sehingga model dapat dinyatakan bebas dari autokorelasi.

Karena nilai *p-value* berada diambang batas, mendekati 0,05 sehingga penelitian ini akan menggunakan prosedur uji robustness untuk menjamin bahwa standar error tetap konsisten terhadap masalah heteroskedastisitas minor dan korelasi serial yang tidak tertangkap oleh uji asumsi klasik.

d) Hasil Akhir Uji Analisis

Tabel 4 8: Nilai Uji Robusness

Variabel	Koefisien	Std.error	t. statistic
Zakat	-0,000619	0,001838	-0,3368
Rasio	-0,000010	0,002339	-0,0046
S Belanja sosial			
IPM	0,000705	0,001389	0,5075
TPT	0,003650	0,001294	2,8199
KFD	-0,000665	0,000436	-1,5223
Zakat:	0,003227	0,000745	4,3275
Rasio			
Belanja			
Sosial			

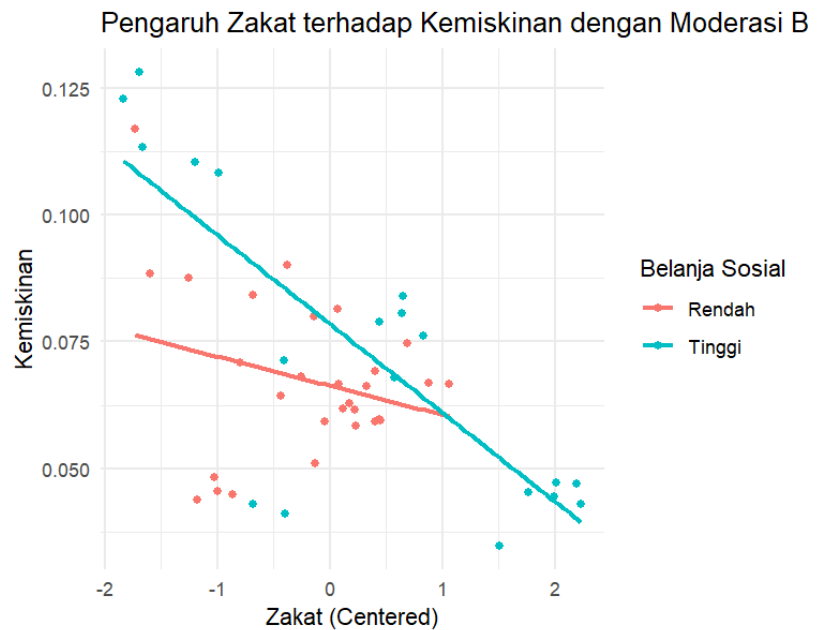
Sumber: R-Studio

Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan uji hasil akhir dengan uji robust arellano untuk memperbaiki standar error dan uji robustness untuk memastikan hasil estimasi tetap valid dan konsisten terhadap gangguan statistik, sehingga pengujian akan lebih

akurat serta memasukkan moderasi pada model (Baltagi, 2013) .

e) Uji Moderasi

Gambar 4.2: Scatter Plot Uji Moderasi



Sumber: R-Studio

Kemudian didapatkan Interpretasi sebagai berikut:

- 1) Pengaruh variabel interaksi (moderasi): Memiliki nilai koefisien 0,00327 dan *p-value* 0,0001. *p-value* menunjukkan nilai kurang dari taraf signifikan $\alpha = 0,01$, artinya rasio belanja sosial dapat memoderasi sangat signifikan pada pengaruh zakat terhadap kemiskinan pada taraf 1%. Selain itu ditemukan moderasi murni dimana variabel zakat dan belanja sosial memiliki nilai yang belum signifikan jika uji secara mandiri.
- 2) Peran Komplementer Zakat: Variabel zakat memiliki nilai koefisien sebesar -0,000619 dan *p-value* = 0,738. Nilai *p-value* tersebut lebih dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel pengeluaran zakat belum terbukti memberikan pengaruh terhadap kemiskinan secara parsial dan belum mampu menjadi instrumen tunggal dalam menekan angka kemiskinan.

- 3) Rasio Belanja Sosial: Rasio belanja sosial memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,000010 dengan nilai signifikansi 0,9963. Nilai *p-value* jauh melebihi ambang batas taraf signifikan $\alpha = 0,05$, maka secara parsial belanja sosial belum terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada sampel 8 provinsi.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): pada IPM koefisien menunjukkan angka yang positif sebesar 0,000705 dan nilai *p-value* sebesar 0,6150. Berdasarkan pada nilai tersebut IPM terbukti belum dapat memberikan pengaruh apabila pengamatan dilakukan dalam jangka pendek.
- 5) Variabel Kontrol (TPT): TPT memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,0036 dan *p-value* menunjukkan angka kurang dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,0079. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka maka akan berpengaruh pada kenaikan tingkat kemiskinan.
- 6) Kapasitas Fiskal Daerah: dari hasil uji analisis, KFD memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,000665 dengan *p-value* 0,1371. Nilai *p-value* yang lebih besar dari taraf signifikan $\alpha = 0.05$ menunjukkan bahwa KFD belum memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada sampel 8 provinsi selama periode 6 tahun. Dengan demikian, tingginya angka KFD atau kemampuan keuangan suatu daerah tidak menjamin penurunan angka kemiskinan apabila tidak dialokasikan secara spesifik diprogram perlindungan sosial.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan dari Hafidhuddin (2002), zakat memiliki manfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai dasar dalam mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak mendapatkannya dan menjadi instrumen keuangan yang dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Kemudian Al-Qardhawi (2002) menerangkan jika zakat memiliki

tujuan dasar, yaitu menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya (Hafidhuddin, 2002; Nafi, 2021). Pada hasil analisis variabel zakat, jika diuji secara mandiri menunjukkan koefisien yang negatif dengan angka $-0,000619$ dan $p\text{-value}$ sebesar $0,7383$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran zakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maghfirah (2021) dan Saerendra (2025) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Maghfirah, 2021; Saerendra, Mukhsin, & Najib, 2025). Dengan demikian, apabila zakat yang disalurkan tidak dengan interaksi program pemerintah, maka pengaruh yang diberikan tidak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

b. Pengaruh Rasio Belanja Sosial terhadap Kemiskinan

Rasio belanja sosial masuk dalam program pemerintah dalam anggaran perlindungan sosial. Tujuan dari adanya program perlindungan sosial yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah dan mampu mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* sehingga diharapkan dapat menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM pada jangka panjang (Kementrian Keuangan, 2024). Pada hasil analisis variabel belanja sosial menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Dilihat dari nilai koefisien di angka $-1,0665$ dan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0,9963$ artinya rasio belanja sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sejalan degan penelitian Triyulianto (2024) dan Salabila (2024) dengan hasil penelitian terhadap belanja sosial secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan (Triyulianto, Nurvita, & Hidayaturahmi, 2024;

Salsabila, Muna, Pradana, & Nurcahya, 2024).

Berdasarkan angka di atas, rasio belanja sosial dapat diindikasikan bahwa masih belum mampu memberikan dampak terhadap kemiskinan.

c. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan arah positif, memiliki koefisien menunjukkan angka yang positif sebesar 0,000705 dan nilai *p-value* sebesar 0,6150 yang berarti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan belum terbukti berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan dengan penelitian oleh Febrianto (2025) dan Saerendra (2025) dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Febrianto, Wati, & Karimah, 2025; Saerendra, Mukhsin, & Najib, 2025).

c. Pengaruh TPT terhadap Kemiskinan

TPT menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0,0036 dan *p-value* menunjukkan angka kurang dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai TPT yang tinggi semakin besar pula tingkat kemiskinan di suatu Provinsi. Sejalan dengan penelitian oleh Febrianto dengan hasil uji analisis simultan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan hasil positif terhadap kemiskinan (Febrianto, Wati, & Karimah, 2025). Hal ini didukung juga dengan teori dimana pengangguran menjadi penyebab dari meningkatnya kemiskinan di suatu wilayah (Wulandari et al., 2022).

e. Pengaruh KFD terhadap Kemiskinan

KFD menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,000665 dengan *p-value* 0,1371. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah secara langsung belum mampu menurunkan kemiskinan secara nyata. Berbeda dengan

penelitian oleh Lisna (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dapat mempercepat penurunan kemiskinan (Lisna, 2013). Dalam teori kapasitas fiskal dijelaskan bahwa kapasitas fiskal memberikan pengaruh terhadap kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan terhadap pengeluaran daerah (Chitiga Mabugu, 2013). Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dapat diindikasikan bahwa dalam kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan dapat memberikan alokasi lebih terhadap belanja sosial, sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan.

f. Moderasi Pengeluaran Zakat

Pada uji moderasi terdapat temuan berupa nilai 1% yang memberikan pengaruh signifikan terhadap interaksi antara zakat dengan rasio belanja sosial dari kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Temuan tersebut menarik karena, dapat dikatakan sebagai moderasi murni (*pure moderation*). Sehingga dapat diidentifikasi jika instrumen zakat dapat menjadi komplementer terhadap program sosial pemerintah. Jika dilihat melalui uji parsial maka variabel zakat dengan variabel rasio belanja sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperhatikan instrumen keuangan islam yaitu zakat sebagai alat pendukung untuk mendongkrak efektivitas program kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan. Perbandingan antara uji parsial dengan uji interaksi. Pada zakat, jika diuji secara parsial, pengaruhnya tidak secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa zakat belum bisa menjadi instrumen keuangan utama dalam mengurangi kemiskinan. Namun apabila zakat secatas komplementer terhadap program perlindungan sosial, rasio belanja sosial maka zakat menunjukkan

pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis dari bab IV hasil dan pembahasan mengenai uji pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan moderasi belanja sosial dan menggunakan variabel kontrol seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) untuk menghindari bias penelitian dengan jumlah 8 provinsi sebagai subjek observasi yaitu, Sumatera Utara, Sumatra Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, dan Riau. dan rentang 6 tahun yaitu 2019-2024. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan model *fixed effect* dengan koreksi *robust arellano* agar terhindar dari *error*. Kemudian kesimpulan dari uji analisis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan tidak secara signifikan dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pengukuran dilakukan secara umum dan jangka panjang sehingga efek yang terlihat dalam jangka waktu 6 tahun tidak terlihat signifikan.
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbukti menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan secara konsisten dan signifikan secara konsisten dan signifikan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kemiskinan di wilayah penelitian masih sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor ketenagakerjaan.
3. Sementara itu pada Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) menunjukkan angka yang tidak signifikan pada penurunan angka kemiskinan dalam jangka pendek terhadap fluktuasi angka kemiskinan pada 8 Provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai ukur pada KFD hanya mengindikasikan kemampuan fiskal daerah dalam pendapatan, sehingga tidak dapat menjamin bahwa dana yang dikeluarkan secara efektif untuk program sosial di daerah tersebut. Walaupun KFD memiliki nilai

koefisien yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya dalam pengaruh penurunan kemiskinan, namun nilai tersebut tidak signifikan sehingga belum dapat disimpulkan bahwa KFD memiliki pengaruh yang nyata.

4. Peran Komplementer Zakat: Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa Zakat merupakan instrumen komplementer murni (*pure moderation*). Pada penelitian ditemukan indikasi bahwa penyaluran zakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, ketika zakat diintervensi dengan variabel belanja sosial, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa zakat akan menjadi efektif ketika terdapat intervensi belanja sosial sebagai instrumen kebijakan publik pemerintah.
5. Peran Komplementer Zakat Terhadap Belanja Sosial: Variabel interaksi antara Zakat dan Belanja Sosial merupakan faktor penentu utama dalam model ini. Belanja sosial menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa belanja sosial sebagai instrumen yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masih terbatas dalam distribusinya. Kemudian peran zakat hadir untuk menutupi celah keterbatasan tersebut, sehingga menciptakan efek pengganda dalam pengentasan kemiskinan dengan skala makro.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah provinsi perlu memperkuat interaksi terhadap lembaga pengelola zakat khususnya terhadap instrumen keuangan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan secara integrasi dan berkelanjutan. Kemudian pada pengelolaan belanja sosial, diharapkan ditingkatkan kualitas distribusi dan perlu diperhatikan untuk tepat sasaran terhadap penerima belanja sosial serta meningkatkan kualitas

monitoring agar dampak dari kebijakan sosial dapat dievaluasi menjadi lebih akurat.

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ)

BAZNAS diharapkan dapat terus mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat agar lebih efektif sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Kemudian dalam upaya untuk meningkatkan optimalisasi dana zakat, program dapat difokuskan pada penyaluran yang produktif seperti pemberdayaan ekonomi mustahik untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat serta kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah perlu ditingkatkan sehingga peran zakat sebagai instrumen komplementer dapat menjadi lebih kuat.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas terhadap jumlah subjek observasi yang hanya terbatas pada 8 Provinsi di Indonesia. Kemudian pada variabel kontrol disarankan untuk menambah jumlah variabel yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi untuk melihat gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Kemudian pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang berbeda, seperti pendekatan dan model analisis yang dinamis untuk menguji konsistensi dari hasil penelitian pengaruh zakat terhadap kemiskinan dengan moderasi belanja sosial. Kemudian pada variabel moderasi dapat diubah untuk mengeksplorasi penemuan terhadap pengaruh zakat, mengingat bahwa pada kajian mengenai moderasi terhadap zakat masih terbatas sehingga dapat mengembangkan penelitian dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adema, W., Fron, P., & Ladaique, M. (n.d.). *Is the European Welfare State Really More Expensive? Indicators on Social Spending, 1980-2012; and a Manual to the OECD Social Expenditure Database (SOCX)*. OECD.
- Alkire, S. (2010). *Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts*. UNDP: Human Development Research Paper.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (Agustus 2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 1.
- Andirja, F. (2023). Bekal Zakat. 309.
- Anwar, A. T. (Juni 2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5.
- Arafah, M. (Desember 2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 13.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. PT. RINEKA CIPTA.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Baltagi, B. H. (2013). *Economic Analysis of Panel Data* (5 uppl.). Great Britain: TJ International Ltd.
- Bawono, A. D., Kusumawati, F. E., & Purbasar, H. (2017). Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa). *University Research Colloquium*.
- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia*.
- BAZNAS. (2024). *Potensi Zakat untuk Indonesia Emas: BAZNAS Targetkan Rp327 Triliun per Tahun. Hämtat från BAZNAS KabupatenSidoarjo. den 16 Maret 2025*
- BAZNAS. (2025). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*. BAZNAS.
- BPS. (2025). *Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Penduduk Miskin*.

- Bungin, H. B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (2). PRENADAMEDIA GROUP.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (Juni 2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 32(1).
- Cheema, A. (2017). The Political Economy of Economic Empowerment: Bringing Politics and Society Back In. IDS WORKING PAPER. 68
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5). Sage Publication.
- Daud, Z., Ahmad, S., & Rahman, A. F. (2011). Model Perilaku Kepatuhan Zakat: Suatu Pendekatan Teori. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Dawn, L., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & A, G. B. (2017). Mean Centering, Multicollinearity, and Moderators in Multiple Regression: The Reconciliation Redux. *BRIEF COMMUNICATION*, 49, 403-404. doi:10.3758/s13428-016-0827-9.
- Dharmakarja, I. G. (2017). REKONSTRUKSI BELANJA BANTUAN SOSIAL. *Substansi*, 1.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia . *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 189-204.
- Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (Maret 2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Harahap, S. F., & Nasution, Y. S. (2024). PENGARUH ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2015 - 2023. *Smart Publisher*, 1. doi:https://doi.org/10.69714/cwtw6a02
- Herdiana, D. (2019). ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1. *EKONOMI*, 15(2).

- Fahrika, A., Ashari, A., & Ansar, S. (2023). Realita Penerapan Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia Dan Permasalahannya. *AL-IQTISHAD : JURNAL*
- Faturrahman, A. (April 2012). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1).
- Febrianto, M. N., Wati, H., & Karimah, Z. J. (2025). The Impact of Zakat and Macroeconomics on Poverty in Indonesia: A Panel Data Analysis of 34 Provinces. *International Journal of Islamic Economics*, 7, 135-151.
- Farezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1).
- Furqan, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Habib, M. A. (November 2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1, 106 - 133. doi:doi: 10.21274
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hill, R. C., & Campbell, R. C. (2012). *Using SAS for Econometrics*. JHON WILEY & SONS, INC.
- Iqbal, M. (Februari 2019). Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20, 26-51.
- JDIH. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019*. Retrieved from JDIH.
- JDIH. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022*. Retrieved from JDIH.
- JDIH. (2024). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024*. Retrieved from JDIH.
- JDIH BPK. (u.d.). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129443/permensos-no-1-tahun-2019>

- JDIH BPK. (u.d.). Pengelola Zakat. Peraturan BPK:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- JDIH Kemenkeu. (u.d.). Dokumen Hukum. JDIH Kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/search?teu=Kementerian+Keuangan&bentuk=Peraturan+Menteri&order=desc>
- Kementrian Keuangan. (2024). Informasi APBN 2024.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia . (u.d.). Peraturan Menteri Keuangan.
 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
- Khoiruddin. (2016). Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8. doi:<https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224>
- Kurniawan, A., & Restianita, O. (Mei 2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4).
- Kusuma , D. F., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh PDRB, IPM, dan Kapasitas Fiskal Terhadap, Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 11(4).
- Koni'ah, D., & Choiri, M. (2025). PENGARUH ZAKAT DAN INFAQ DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2021. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.
- Lazuardi, A. M., & Santoso, D. B. (2024). ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI JAWA BARAT. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3.
- Ma'arif, A., Saleh, M., & Saputri, R. (Juni 2025). Zakat, Infak, da Sedekah: Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance*, 11, 144-159.
- Medaline, O. (Desember 2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2). 70

- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. (M. Kara, Red.) Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Muna, M., Ali, Z. M., & Indra. (2025). Dampak Penyaluran Zakat, UMP, IPM dan TPT terhadap Kemiskinan di Aceh. *Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 4.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. (Nurdin, Red.) Lembaga Naskah Aceh.
- Nafi, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02).
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 2.
- Nugroho, A. W., & Susilo, A. (2025). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19.
- Nurlaela, N., & Aswad, A. M. (2018). Effect of Zakat on Poverty Using Simple Regression Method (Case Study: Yogyakarta City Baznas 2012-2016). *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, 18.
- Nursini. (September 2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7. doi:<https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hämtat från Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK).
- Pemerintah Republik Indonesia. (u.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (JDIH BPK).
- Pinasti, E. R., & Nastari, T. P. (2025). The Effect of ZISWAF Funds and Government Expenditure on Poverty Levels in Indonesia. *ISEFIN JOURNAL*, 1.

- Prasetia, I. (2022). Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik. UMSU Press.
- Pratiwi, A. E., Wulandari, D., Hutabarat, E. T., & Silaban, S. T. (Desember 2024). Tinjauan Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12).
- Pusparini, M. D. (Juni 2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1).
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hämtat från JDIH BPK RI.
- Republika. (Januari 2025). UMKM Berkelanjutan Kunci Masa Depan Ekonomi Indonesia. Republika: <https://analisis.republika.co.id/berita/sqo3ff377/umkm-berkelanjutan-kunci-masa-depan-ekonomi-indonesia-part2> den 13 Maret 2025 71
- RI, B. (u.d.). Database Peraturan. JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). ANALISIS PENGARUH ZAKAT, PEMBIAYAAN SYARIAH DAN APBN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17.
- Ridwan, Ilyas, H., & Adha, A. M. (2023). Corporate Zakat in the Perspective of Stakeholder Theory: A Case Study of Islamic Rural Banks. *AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19, 86 - 98. doi:DOI: <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.16329>
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan*, 14(1).
- Rossa, A., & Ananda, C. F. (Juni 2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3, 803-813.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1, 1-13.

- Santos, M., & Simoes, M. (2025). Social Expenditure Composition, Welfare Models and Standards of Living Across the OECD. *International Journal of Economic Policy Studies*, 19.
- Stewart, F. (2004). *Development and Security*. CRISE Working Paper.
- Suryawati, C. (September 2005). Memahami Kemiskinan Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3).
- Susanti, N. (2024). Zakat dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Kepustakaan. *Social Science Academic*, 2.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2).
- Syariza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH*, 4, 137 - 159.
- The World Bank. (2023). Pathways Towards Economics Security Indonesian Poverty Assesment.
- Tikha Q.A., D., & Sujarwoto. (2015). Desentralisasi dan kesehatan keuangan daerahdi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi* (3 ed.). ERLANGGA.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9 ed.). ERLANGGA.
- Triyulianto, T., Nurvita, B. S., & Hidayaturahmi. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Good Governance*, 20.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (Februari 2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1).72
- West, R. M. (2022). Best Practice in Statistics: The Use of Log Transformation. *Annals of Clinical Biochemistry*, 59. doi:<https://doi.org/10.1177/00045632211050531>

- Widiarsih, D. (Desember 2021). Perilaku Pemerintah Indonesia Dalam Memaksimalkan Welfare (Pendekatan Rawlasian-Utilitarian). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 11(2).
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, N. L., & Al Mustafa, M. U. (2021). A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare. *Cogent Business & Management*, 8. doi:DOI: 10.1080/23311975.2021.1882039
- Wulandari, I., & Pratama, A. A. (2022). Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (Maret 2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- World Bank. (2020). *Belanja Untuk Hasil yang Lebih Baik*.

LAMPIRAN

Provinsi	Tahun	Zakat	IPM	Kemiskinan	TPT	Belanja_Sosial	Total_Belanja	Rasio_Belanja	KPD
SUMATERA UTARA	2019	3884336300	71.74	8.83%	5.480	182230000000	579102000000	0.31%	0.945
SUMATERA UTARA	2020	5493669280	71.77	8.75%	5.810	123550000000	5394887000000	0.23%	1.115
SUMATERA UTARA	2021	13247723502	72.00	9.01%	6.170	177120000000	5509412000000	0.32%	0.893
SUMATERA UTARA	2022	9723152052	72.71	8.42%	5.815	233160000000	5737647000000	0.41%	2.019
SUMATERA UTARA	2023	20647543323	73.37	8.15%	5.565	160310000000	5720602000000	0.28%	2.238
SUMATERA UTARA	2024	16820305997	74.02	7.99%	5.350	177740000000	6272678000000	0.28%	2.351
SUMATERA BARAT	2019	12455280878	72.39	6.42%	5.380	66800000000	2766783000000	0.24%	0.455
SUMATERA BARAT	2020	22866156685	72.38	6.38%	6.065	339000000000	2585765000000	0.13%	0.594
SUMATERA BARAT	2021	26771814431	72.65	6.63%	6.595	41020000000	2584484000000	0.16%	0.461
SUMATERA BARAT	2022	28867918310	73.26	5.92%	6.225	71860000000	2614769000000	0.27%	1.411
SUMATERA BARAT	2023	30307008914	73.75	5.95%	5.920	46780000000	2472360000000	0.19%	1.460
SUMATERA BARAT	2024	29884627155	74.49	5.97%	5.770	44340000000	2799994000000	0.16%	1.151
DIJAKARTA	2019	8693203068	80.76	3.47%	6.020	440233000000	6493835000000	6.78%	1.147
DIJAKARTA	2020	113004566375	80.77	4.53%	8.050	480263000000	5208818000000	9.22%	6.207
DIJAKARTA	2021	143739934994	81.11	4.72%	8.505	653836000000	6165194000000	10.59%	11.391
DIJAKARTA	2022	172775364184	81.65	4.69%	7.590	503540000000	6486512000000	7.76%	3.007
DIJAKARTA	2023	142094160529	82.46	4.44%	7.050	272677000000	6133869000000	4.45%	3.410
DIJAKARTA	2024	180389580668	83.08	4.30%	6.120	349663000000	7001272000000	4.99%	2.702
JAWABARAT	2019	28968406253	72.03	6.91%	7.910	686740000000	12971696000000	0.53%	3.171
JAWABARAT	2020	29849463666	72.09	7.88%	9.085	844070000000	12804815000000	0.66%	4.676
JAWABARAT	2021	36836599883	72.45	8.40%	9.370	142569000000	1306372000000	1.09%	3.602
JAWABARAT	2022	36586161054	73.12	8.06%	8.330	1021750000000	12886025000000	0.79%	2.546
JAWABARAT	2023	44522121440	73.74	7.62%	7.665	91450000000	12781196000000	0.72%	2.456
JAWABARAT	2024	38547810534	74.43	7.46%	6.830	70402000000	14361537000000	0.49%	2.142
DI YOGYAKARTA	2019	3400164246	79.99	11.70%	3.035	67400000000	1614371000000	0.42%	0.314
DI YOGYAKARTA	2020	3080378553	79.97	12.28%	3.975	95250000000	1485176000000	0.64%	0.390
DI YOGYAKARTA	2021	3561019364	80.22	12.80%	4.420	113310000000	1558124000000	0.73%	0.269
DI YOGYAKARTA	2022	3634043054	80.64	11.34%	3.895	13390000000	1617794000000	0.83%	1.230
DI YOGYAKARTA	2023	5845454810	81.07	11.04%	3.635	121840000000	1579333000000	0.77%	1.418
DI YOGYAKARTA	2024	7156943940	81.55	10.83%	3.360	15049000000	1754602000000	0.86%	1.246
BANTEN	2019	16966195218	72.44	5.09%	7.830	16165000000	3693420000000	0.44%	1.135
BANTEN	2020	18458154538	72.45	5.92%	9.315	10946000000	3274966000000	0.33%	0.847
BANTEN	2021	2094459159	72.72	6.66%	8.995	15403000000	3610266000000	0.43%	0.708
BANTEN	2022	24074703192	73.32	6.16%	8.310	17435000000	3775858000000	0.46%	2.934
BANTEN	2023	21846700132	73.87	6.17%	7.745	73350000000	3822465000000	0.19%	2.819
BANTEN	2024	24036230933	74.48	5.84%	6.850	42990000000	1190789000000	0.36%	2.289
KALIMANTAN SELATAN	2019	7087524813	70.72	4.55%	3.795	14478000000	262158000000	0.55%	0.812
KALIMANTAN SELATAN	2020	5927950867	70.91	4.38%	4.205	10784000000	251012000000	0.43%	0.891
KALIMANTAN SELATAN	2021	6886000788	71.28	4.83%	4.640	11628000000	2529258000000	0.46%	1.133
KALIMANTAN SELATAN	2022	8121202220	71.84	4.49%	4.470	16392000000	2795146000000	0.59%	2.339
KALIMANTAN SELATAN	2023	9717173089	72.50	4.29%	4.130	20323000000	3309048000000	0.61%	1.903
KALIMANTAN SELATAN	2024	12965128028	73.03	4.11%	4.045	26575000000	4468117000000	0.59%	2.617
RIAU	2019	8659240497	73.00	7.08%	5.560	78460000000	3253050000000	0.24%	0.956
RIAU	2020	15023333698	72.71	6.82%	5.620	86440000000	3066973000000	0.28%	1.016
RIAU	2021	12820464822	72.94	7.12%	4.690	19012000000	3107001000000	0.61%	0.887
RIAU	2022	34106070573	73.52	6.78%	4.385	21291000000	3329859000000	0.64%	2.215
RIAU	2023	46670023340	74.04	6.68%	4.240	13626000000	3468741000000	0.39%	2.567
RIAU	2024	55586781544	74.79	6.67%	3.775	14866000000	3630307000000	0.42%	2.074

Lampiran 1: Data Agregat Variabel

```
library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)
library(car)
# 1. Baca data
data <-
read_xlsx("C:/Users/ASUS/Downloads/Data11.xlsx")
# 2. Ubah ke panel data
pdata <- pdata.frame(data, index = c("Provinsi",
"Tahun"))
# 3. Buat variabel log (opsional kalau skalanya besar)
pdata$ln_Zakat <- log(pdata$Zakat)
pdata$ln_Belanja <- log(pdata$Rasio_Belanja)
# 3.1
data_pilih <- pdata[, c("Kemiskinan", "ln_Zakat",
"ln_Belanja", "IPM", "TPT","KFD")]

data.frame(
  Variabel = names(data_pilih),
  Mean = sapply(data_pilih, mean, na.rm = TRUE),
  Min = sapply(data_pilih, min, na.rm = TRUE),
```

```

    Max = sapply(data_pilih, max, na.rm = TRUE),
    Std_Dev = sapply(data_pilih, sd, na.rm = TRUE))
summary(data_pilih)
names(data)
# 4 Uji model
#Common Effect
model_pool <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja +
KFD + IPM + TPT, data = pdata, model = "pooling")
summary(model_pool)
#Fixed Effect
model_fe <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja + KFD
+ IPM + TPT,
               data = pdata, model = "within")
summary(model_fe)
#Random effect
model_re <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja + KFD
+ IPM + TPT, data = pdata, model = "random")
summary(model_re)
# Uji Chow
pFtest(model_fe, model_pool)
# Uji haussman
phptest(model_fe, model_re)
# Uji LM
plmtest(model_pool, type = "bp")

# 6 mean centering
pdata$Zakat_c <- pdata$ln_Zakat - mean(pdata$ln_Zakat)
pdata$Belanja_c <- pdata$ln_Belanja -
mean(pdata$ln_Belanja)
pdata$interaction <- pdata$Zakat_c * pdata$Belanja_c
model_fe2 <- plm(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c +
interaction + KFD + IPM + TPT,
               data = pdata,
               model = "within")

# 7 uji multikolinearitas
vif(lm(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction +
KFD + IPM + TPT,
      data = pdata))

# 8 Uji Heteroskedastisitas
bptest(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction +
KFD + IPM + TPT, data = pdata)
# Uji autokorelasi
pbgtest(model_fe2)

#uji normalitas
res <- residuals(model_fe2)

```

```

#Uji Shapiro Wilk
shapiro.test(res)

# 5 Robust standar
coeftest(model_fe2, vcov = vcovHC(model_fe2, method =
"arellano", type = "HC1", cluster = "group"))
res_robust <- coeftest(model_fe2, vcov =
vcovHC(model_fe2, method = "arellano", type = "HC1",
cluster = "group"))
print(res_robust)

summary(model_fe2)
hasil_final <- coeftest(model_fe2, vcov =
vcovHC(model_fe2, method = "arellano", type = "HC1",
cluster = "group"))
print(hasil_final)
# Uji cross-section dependence
pcdtest(model_fe2, test = "cd")

library(corrplot)

cor_matrix <- cor(pdata[, c("Kemiskinan", "ln_Zakat",
"ln_Belanja", "IPM", "TPT", "KFD")])

corrplot(cor_matrix,
          method = "color",
          addCoef.col = "black",
          tl.cex = 0.8)

data_tahun$Tahun <-
as.numeric(as.character(data_tahun$Tahun))

ggplot(data_tahun, aes(x = Tahun, y = Kemiskinan, group
= 1)) +
  geom_line(color = "blue", size = 1.2) +
  geom_point(color = "red", size = 2.5) +
  labs(title = "Tren Kemiskinan per Tahun",
        x = "Tahun",
        y = "Kemiskinan") +
  theme_minimal()

library(ggplot2)

# ambil residual dan fitted dari model
df_resid <- data.frame(
  fitted = fitted(model_fe2),
  resid = residuals(model_fe2))

```

```

# plot
ggplot(df_resid, aes(x = fitted, y = resid)) +
  geom_point(color = "darkgreen", alpha = 0.6) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "red", linetype =
"dashed") +
  labs(title = "Scatter Plot Residual vs Fitted",
        x = "Fitted Values",
        y = "Residual") +
  theme_minimal()

library(ggplot2)

df$Belanja_kategori <- ifelse(
  df$Belanja_c > 0,
  "Tinggi", "Rendah")

ggplot(df, aes(x = Zakat_c, y = Kemiskinan, color =
Belanja_kategori)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(title = "Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan
dengan Moderasi Belanja Sosial",
        x = "Zakat (Centered)",
        y = "Kemiskinan",
        color = "Belanja Sosial") +
  theme_minimal()

```

Lampiran 2: Syntax Analisis Regresi Data Panel R-Studio

```

> library(plm)
> library(lmtest)
> library(sandwich)
> library(car)
> # 1. Baca data
> data <- read_xlsx("C:/Users/ASUS/Downloads/Data11.xls
x")
> # 2. Ubah ke panel data
> pdata <- pdata.frame(data, index = c("Provinsi", "Tah
un"))
> # 3. Buat variabel log (opsional kalau skalanya besar
)
> pdata$ln_Zakat <- log(pdata$Zakat)
> pdata$ln_Belanja <- log(pdata$Rasio_Belanja)
> # 3.1

```

```

> data_pilih <- pdata[, c("Kemiskinan", "ln_Zakat", "ln
_Belanja", "IPM", "TPT", "KFD")]
> data.frame(
+   Variabel = names(data_pilih),
+   Mean = sapply(data_pilih, mean, na.rm = TRUE),
+   Min = sapply(data_pilih, min, na.rm = TRUE),
+   Max = sapply(data_pilih, max, na.rm = TRUE),
+   Std_Dev = sapply(data_pilih, sd, na.rm = TRUE))
      Variabel      Mean      Min      Max
Std_Dev
Kemiskinan Kemiskinan 0.06967292 0.034700 0.128000 0
.02294454
ln_Zakat    ln_Zakat 23.68261185 21.848318 25.918385 1
.06936259
ln_Belanja  ln_Belanja -5.13823309 -6.661131 -2.244815 1
.06643581
IPM          IPM 74.92125000 70.720000 83.080000 3
.74037979
TPT          TPT  5.99145833  3.035000  9.370000 1
.76528883
KFD          KFD  2.01165208  0.269000 11.391000 1
.82183288
> summary(data_pilih)
      Kemiskinan      ln_Zakat      ln_Belanja
IPM      TPT
Min.      :0.03470  Min.      :21.85  Min.      :-6.661  Min
.      :70.72  Min.      :3.035
1st Qu.:0.05025  1st Qu.:22.87  1st Qu.: -5.788  1st
Qu.:72.45  1st Qu.:4.411
Median :0.06665  Median :23.76  Median : -5.380  Med
ian :73.29  Median :5.812
Mean    :0.06967  Mean    :23.68  Mean    : -5.138  Mea
n    :74.92  Mean    :5.991
3rd Qu.:0.08082  3rd Qu.:24.27  3rd Qu.: -4.936  3rd
Qu.:76.08  3rd Qu.:7.609
Max.    :0.12800  Max.    :25.92  Max.    : -2.245  Max
.    :83.08  Max.    :9.370
      KFD
Min.      : 0.269
1st Qu.: 0.932
Median : 1.439
Mean    : 2.012
3rd Qu.: 2.551
Max.    :11.391
> names(data)
[1] "Provinsi"      "Tahun"          "Zakat"
     "IPM"

```

```

[5] "Kemiskinan"      "TPT"              "Belanja_Sosial"
"Total_Belanja"
[9] "Rasio_Belanja"   "KFD"
> #Common Effect
> model_pool <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja +
KFD + IPM + TPT, data = pdata, model = "pooling")
> summary(model_pool)
Pooling Model

Call:
plm(formula = Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD
+ IPM +
      TPT, data = pdata, model = "pooling")

Balanced Panel: n = 8, T = 6, N = 48

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-0.0209659 -0.0106122 -0.0012875  0.0107125  0.0257886

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr
(>|t|)
(Intercept)    0.74012315  0.32079617  2.3071 0.0
261720 *
ln_Zakat      -0.04708581  0.01265508 -3.7207 0.0
005966 ***
ln_Belanja     0.14807060  0.06328936  2.3396 0.0
242561 *
KFD            0.00158940  0.00159380  0.9972 0.3
244967
IPM            0.00524311  0.00085177  6.1555 2.5
99e-07 ***
TPT            0.00417363  0.00153475  2.7194 0.0
095459 **
ln_Zakat:ln_Belanja -0.00647970  0.00255100 -2.5401 0.0
149681 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.
1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    0.024743
Residual Sum of Squares: 0.007802
R-Squared:              0.68468
Adj. R-Squared:         0.63854
F-statistic: 14.838 on 6 and 41 DF, p-value: 6.273e-09
> #Fixed Effect

```

```

> model_fe <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja + KFD
+ IPM + TPT,
+ data = pdata, model = "within")
> summary(model_fe)
Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD
+ IPM +
TPT, data = pdata, model = "within")

Balanced Panel: n = 8, T = 6, N = 48

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-0.00785327 -0.00186973  0.00025597  0.00221831  0.0090
9304

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(
>|t|)
ln_Zakat      0.01596171  0.01010357  1.5798 0.1
23410
ln_Belanja    -0.07643380  0.04161883 -1.8365 0.0
75037 .
KFD           -0.00066521  0.00052812 -1.2596 0.2
16397
IPM            0.00070537  0.00119897  0.5883 0.5
60207
TPT            0.00365042  0.00117602  3.1041 0.0
03832 **
ln_Zakat:ln_Belanja 0.00322697  0.00175789  1.8357 0.0
75159 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.
1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    0.00083581
Residual Sum of Squares: 0.00051231
R-Squared:              0.38705
Adj. R-Squared:         0.15268
F-statistic: 3.57819 on 6 and 34 DF, p-value: 0.0074228
> #Random effect
> model_re <- plm(Kemiskinan ~ ln_Zakat*ln_Belanja + KFD
+ IPM + TPT, data = pdata, model = "random")
> summary(model_re)

```

Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)

Call:
plm(formula = Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD
+ IPM +
TPT, data = pdata, model = "random")

Balanced Panel: n = 8, T = 6, N = 48

Effects:

	var	std.dev	share
idiosyncratic	1.507e-05	3.882e-03	0.309
individual	3.371e-05	5.806e-03	0.691

theta: 0.7367

Residuals:

	Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
	-0.01254721	-0.00389775	-0.00021541	0.00399870	0.01302696

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z-value	Pr(> z)
(Intercept)	0.45265506	0.24968097	1.8129	0.069842 .
ln_Zakat	-0.02749795	0.01072065	-2.5650	0.010319 *
ln_Belanja	0.07670807	0.04679116	1.6394	0.101136
KFD	0.00037231	0.00075471	0.4933	0.621786
IPM	0.00317956	0.00099045	3.2102	0.001326 **
TPT	0.00363760	0.00147845	2.4604	0.013878 *
ln_Zakat:ln_Belanja	-0.00331744	0.00192486	-1.7235	0.084803 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 0.0024934
Residual Sum of Squares: 0.0015754
R-Squared: 0.36819
Adj. R-Squared: 0.27573

Chisq: 23.8934 on 6 DF, p-value: 0.00054638

```
> # Uji Chow  
> pFtest(model_fe, model_pool)
```

F test for individual effects

data: Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD + IPM +
TPT

F = 69.112, df1 = 7, df2 = 34, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects

```
> # Uji haussman  
> phtest(model_fe, model_re)
```

Hausman Test

data: Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD + IPM +
TPT

chisq = 140.52, df = 6, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: one model is inconsistent

```
> # Uji LM  
> plmtest(model_pool, type = "bp")
```

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)

data: Kemiskinan ~ ln_Zakat * ln_Belanja + KFD + IPM +
TPT

chisq = 70.486, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects

```
> # 6 mean centering  
> pdata$Zakat_c <- pdata$ln_Zakat - mean(pdata$ln_Zakat  
)  
> pdata$Belanja_c <- pdata$ln_Belanja - mean(pdata$ln_B  
elanja)  
> pdata$interaction <- pdata$Zakat_c * pdata$Belanja_c  
> model_fe2 <- plm(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + i  
ninteraction + KFD + IPM + TPT,  
+ data = pdata,  
+ model = "within")  
> # 7 uji multikolinearitas  
> vif(lm(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction  
+ KFD + IPM + TPT,  
+ data = pdata))  
Zakat_c Belanja_c interaction KFD  
IPM TPT
```

```

      2.358486      5.776863      4.439263      2.082392      2.50
7003      1.812951

```

```

> # 8 Uji Heteroskedastisitas
> bptest(Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction
+ KFD + IPM + TPT, data = pdata)

```

studentized Breusch-Pagan test

```

data:  Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction +
      KFD + IPM +      TPT
BP = 10.492, df = 6, p-value = 0.1054

```

```

> # Uji autokorelasi
> pbgttest(model_fe2)

```

Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models

```

data:  Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction +
      KFD + IPM + ...
chisq = 12.074, df = 6, p-value = 0.06033
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors

```

```

> #uji normalitas
> res <- residuals(model_fe)
> #Uji Shapiro Wilk
> shapiro.test(res)

```

Shapiro-Wilk normality test

```

data:  res
W = 0.97761, p-value = 0.4833

```

```

> # 5 Robust standar
> coeftest(model_fe2, vcov = vcovHC(model_fe, method =
"arellano", type = "HC1", cluster = "group"))

```

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
KFD	-0.00066521	0.00043699	-1.5223	0.137189
IPM	0.00070537	0.00138977	0.5075	0.615047
TPT	0.00365042	0.00129453	2.8199	0.007958 **

```

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
1 ' ' 1

```

```
> res_robust <- coeftest(model_fe2, vcov = vcovHC(model_fe, method = "arellano", type = "HC1", cluster = "group"))
> print(res_robust)
```

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
KFD	-0.00066521	0.00043699	-1.5223	0.137189
IPM	0.00070537	0.00138977	0.5075	0.615047
TPT	0.00365042	0.00129453	2.8199	0.007958 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
> summary(model_fe2)
Oneway (individual) effect Within Model
```

Call:
plm(formula = Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction + KFD + IPM + TPT, data = pdata, model = "within")

Balanced Panel: n = 8, T = 6, N = 48

Residuals:

	Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
	-0.00785327	-0.00186973	0.00025597	0.00221831	0.00909304

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
Zakat_c	-6.1923e-04	2.3602e-03	-0.2624	0.794627
Belanja_c	-1.0665e-05	2.3484e-03	-0.0045	0.996403
interaction	3.2270e-03	1.7579e-03	1.8357	0.075159 .
KFD	-6.6521e-04	5.2812e-04	-1.2596	0.216397
IPM	7.0537e-04	1.1990e-03	0.5883	0.560207
TPT	3.6504e-03	1.1760e-03	3.1041	0.003832 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 0.00083581
Residual Sum of Squares: 0.00051231
R-Squared: 0.38705

```

Adj. R-Squared: 0.15268
F-statistic: 3.57819 on 6 and 34 DF, p-value: 0.0074228
> hasil_final <- coeftest(model_fe2, vcov = vcovHC(model_fe2, method = "arellano", type = "HC1", cluster = "group"))
> print(hasil_final)

```

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Zakat_c	-6.1923e-04	1.8386e-03	-0.3368	0.7383391
Belanja_c	-1.0665e-05	2.3391e-03	-0.0046	0.9963888
interaction	3.2270e-03	7.4570e-04	4.3275	0.0001255 *
KFD	-6.6521e-04	4.3699e-04	-1.5223	0.1371888
IPM	7.0537e-04	1.3898e-03	0.5075	0.6150468
TPT	3.6504e-03	1.2945e-03	2.8199	0.0079578 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

> # Uji cross-section dependence
> pcdtest(model_fe2, test = "cd")

```

Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels

```

data: Kemiskinan ~ Zakat_c + Belanja_c + interaction +
      KFD + IPM + TPT
z = 1.635, p-value = 0.102
alternative hypothesis: cross-sectional dependence

```

Lampiran 3: Hasil Analisis Syntax R Studio

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 23 November 2001 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Rusyani dan Sitinurhayati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Sekar Kemuning Wanagati 6 no. 16, Rt. 05, Rw.03, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Karya Mulya, Kota Cirebon. No. Hp 083194280904. Alamat E-mail: mhasan2338@gmail.com. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 2 Kota Cirebon, lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2021 penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis pernah aktif menjadi ketua Kelompok Studi Bisnis Islam, aktif dalam kegiatan Kajian, dan Penelitian, dan aktif di organisasi mahasiswa.